



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Bupati);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2013.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- BAB III : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah;
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013;
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
- BAB VI : Penutup.

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Selanjutnya KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana ayat (2) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2013.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 29.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2012**

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI		i - 1
BAB	I PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 LATAR BELAKANG	I - 2
	1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I - 2
	1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I - 3
	1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I - 4
	1.5 PROSES PENYUSUNAN	I - 5
	1.6 MAKSUD DAN TUJUAN	I - 6
BAB	II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II - 1
	2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	II - 1
	2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI	II - 1
	2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II - 6
	2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II - 6
	2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II - 9
	2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2011	II - 14
BAB	III RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 1
	3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 1
	3.1.1 KONDISI EKONOMI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN TAHUN 2013	III - 1
	3.1.2 KONDISI EKONOMI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011	III - 2
	3.2 ARAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 5
	3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 6
	3.3.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDAANAAN	III - 7
	3.3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 8
	3.3.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	III - 8
	3.3.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	III - 10
	3.3.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III - 13
BAB	IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013	IV - 1
	4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV - 1
	4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	IV - 3

BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V - 1
BAB	VI	PENUTUP	VI - 1
	6.1	KAIDAH PELAKSANAAN	VI - 1
	6.2	PENUTUP	VI - 2

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa BAPPEDA diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunan APBD. Dokumen RKPD tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. RKPD juga menjadi landasan penyusunan RAPBD tahun 2013, untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasi dalam RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 disusun dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 serta memperhatikan aspirasi stakeholder pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proses penyusunan RKPD dikoordinasikan oleh BAPPEDA bersama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilakukan melalui tahapan : pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, penyusunan draft dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka membahas draft RKPD. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan RKPD yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep perencanaan disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, stratejik, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.

RKPD disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut, pertama sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh daerah (RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 -2013); kedua sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan

kondisi dan kemampuan daerah; ketiga bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, antara lain meliputi penanganan kemiskinan, pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan ketiga fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4502);

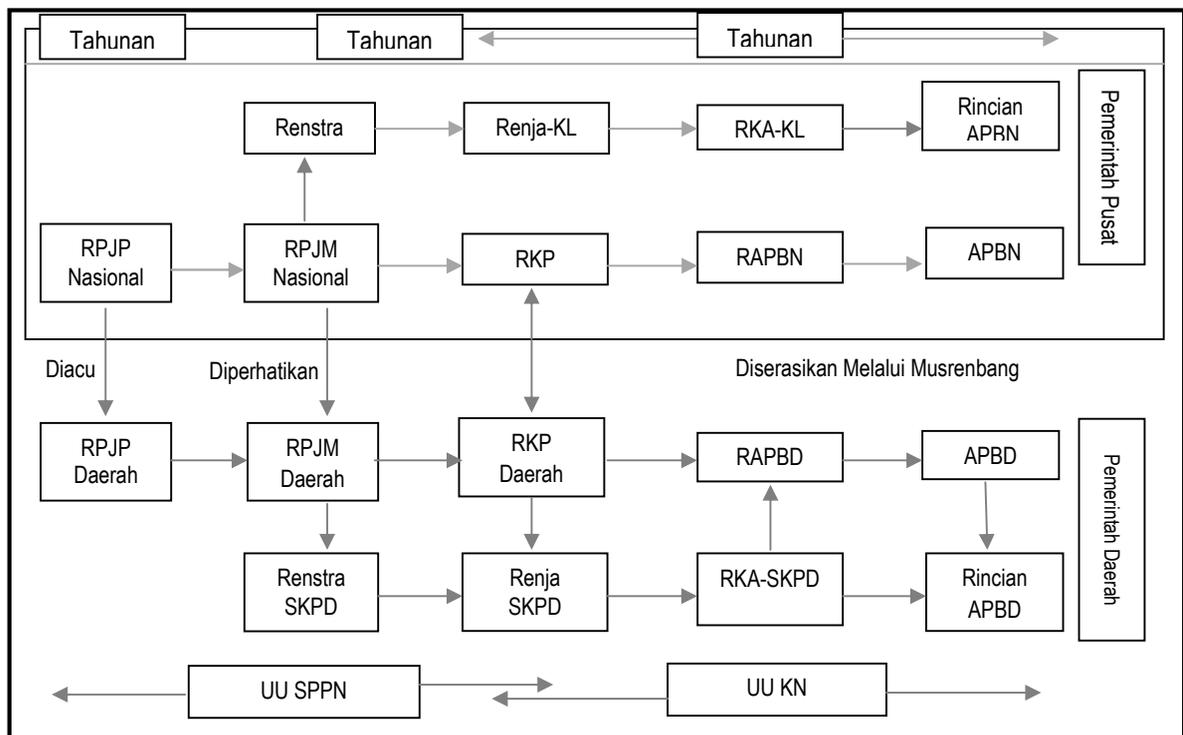
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008-2013. Maka RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra SKPD. Diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar I - 1 : Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No.25 tahun 2004)



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, proses penyusunan serta maksud dan tujuan RKPD Tahun 2013;

- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : aspek geografi dan demografi; selanjutnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD hingga tahun 2011, realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah;
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH berisi arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2012 dan tahun 2013, serta arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2013;
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, berisi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD tahun 2013;
- BAB VI PENUTUP.

1.5 Proses Penyusunan

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan prinsip - prinsip bottom up dan top down planning, prioritas dan realisasi, dijabarkan dalam :

1. Proses Penyusunan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di berbagai tingkatan secara berjenjang, yakni tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pendekatan ini dilakukan dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kepada wilayah dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan rancangan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan kebijakannya masing-masing. Bersamaan dengan itu disampaikan batasan umum sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi antara lain tentang prioritas pembangunan dan alokasi dana;

2. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dan didistribusikan ke seluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar Daerah, Provinsi dan Pusat;
3. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain berdasarkan prioritas, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.6 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 adalah :

- a. Mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar bidang dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumber-sumber daya dalam pembangunan daerah.

B A B I I
E V A L U A S I H A S I L
P E L A K S A N A A N R K P D T A H U N 2 0 1 1
D A N C A P A I A N K I N E R J A
P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi.

a. Aspek Geografi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1 : Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Babulu	0	12	399,45
2.	Waru	1	3	553,88
3.	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
Jumlah		24	30	3.333,06

Sumber Data : KDA tahun 2011

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makasar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir dan Selat Makasar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km² yang terdiri dari 3.060,82 Km² luas daratan dan 272,24 Km² luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Kondisi wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian mengalami abrasi yang disebabkan oleh air laut. Untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara 14 hari perbulan dengan rata-rata curah hujan 229 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan terjadi pada bulan Februari, April, Juni hingga Agustus, Oktober hingga Desember. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Januari sampai bulan Maret, Mei dan pada bulan Juli.

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim *tropika humida*. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰C sampai dengan 34⁰C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-7⁰C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus dan berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zone 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun.

b. Aspek Demografi.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, dan merupakan pelaku dan sasaran pembangunan. Penduduk Kabupaten Penajam Paser secara rinci dapat dilihat pada tabel II.2 dan grafik II.1 sebagai berikut :

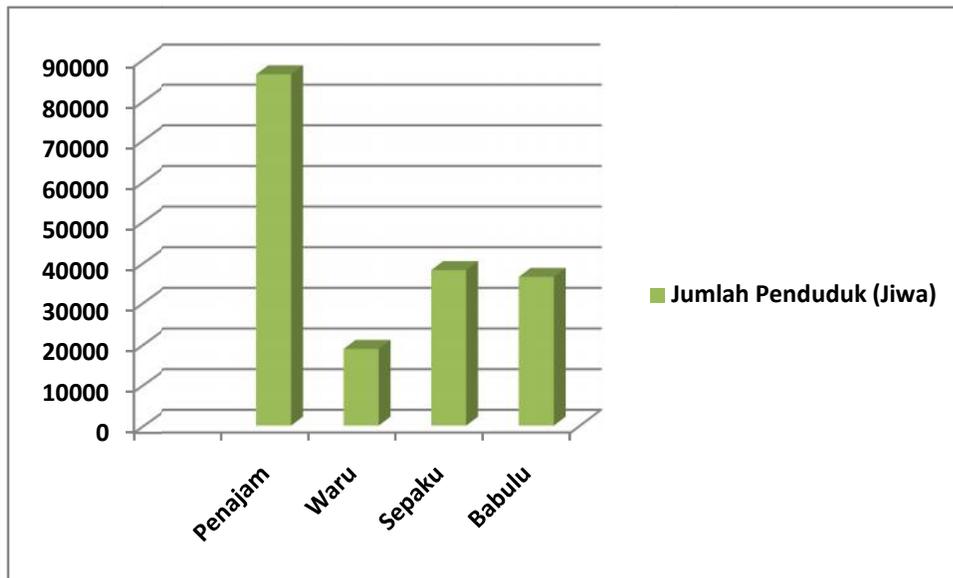
Tabel II.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penajam	45,804	40,636	86,440
2.	Waru	9,932	8,950	18,882
3.	Sepaku	20,177	18,089	38,266
4.	Babulu	19,340	17,254	36,594
TOTAL		95,253	84,929	180,182

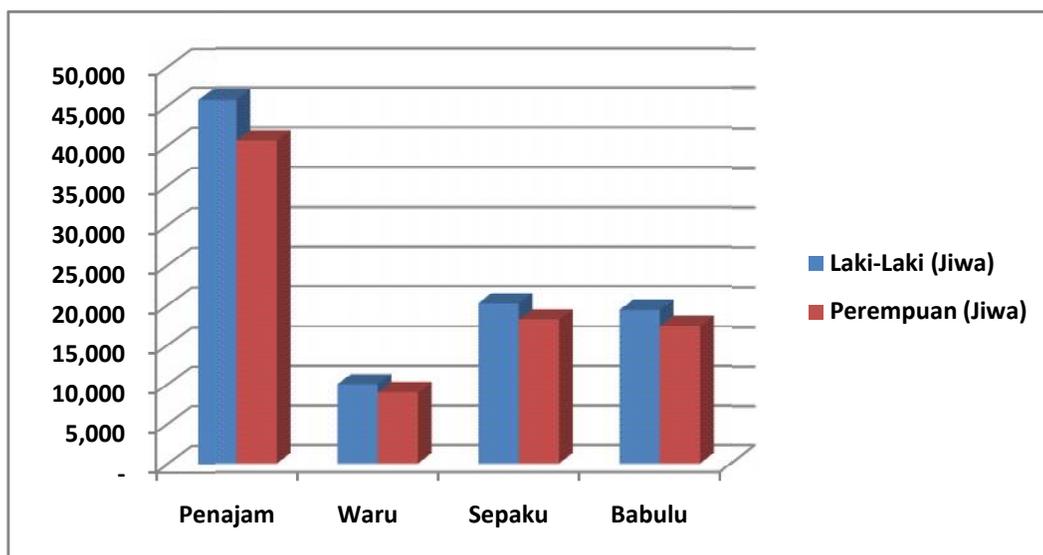
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebesar 26,07 persen yaitu dari 142.922 jiwa pada tahun 2010 menjadi 180.182 jiwa pada tahun 2011. Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka penduduk laki-laki dan penduduk perempuan masing-masing naik sebesar 27,09 persen dan 24,94 persen. Rasio jenis kelamin penduduk tahun 2011 tercatat 112,17 artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki.

Grafik II.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan



Grafik II.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



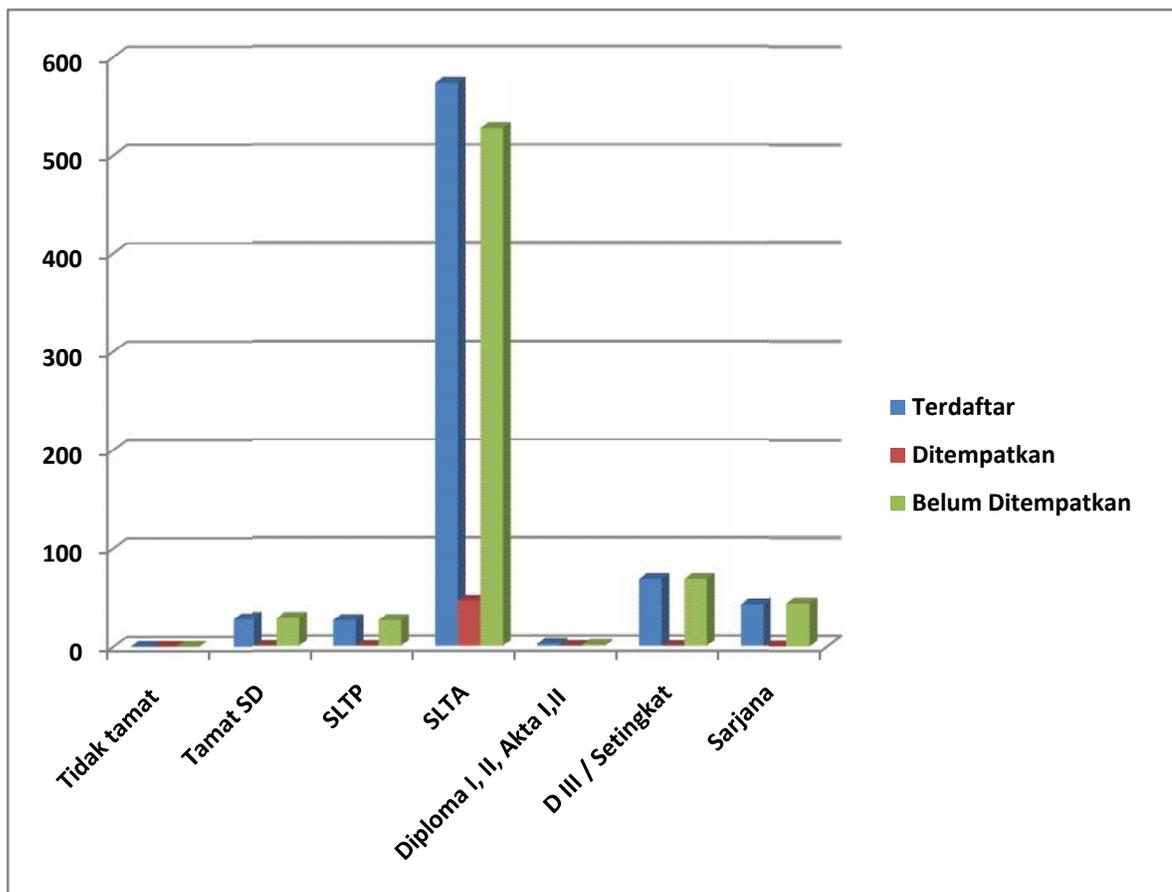
Jumlah pencari kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebanyak 739 orang dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 1.959 orang atau mengalami penurunan 62 %. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya jumlah para pencari kerja yang paling banyak adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTA sebanyak 573 orang dan sudah ditempatkan sebanyak 357 orang, yang belum ditempatkan sebanyak 46 orang. Urutan kedua jumlah terbesar adalah pencari kerja berpendidikan D III/Setingkat sebanyak 68 orang belum ditempatkan. Jumlah terbesar ketiga berpendidikan Sarjana sebanyak 42 orang semuanya belum ditempatkan. Sisanya adalah pencari kerja yang berpendidikan SD sebanyak 28 orang.

Tabel II.3 : Pencari kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2011

No.	Pendidikan	Terdaftar	Ditempatkan	Belum ditempatkan
1.	Tidak tamat SD	-	-	-
2.	Tamat SD	28	-	28
3.	SLTP	26	-	26
4.	SLTA	573	46	527
5.	Diploma I, II, Akta I, II	2	-	1
6.	Diploma III/Setingkat	68	-	68
7.	Sarjana	42	-	42
Jumlah		739	46	692

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

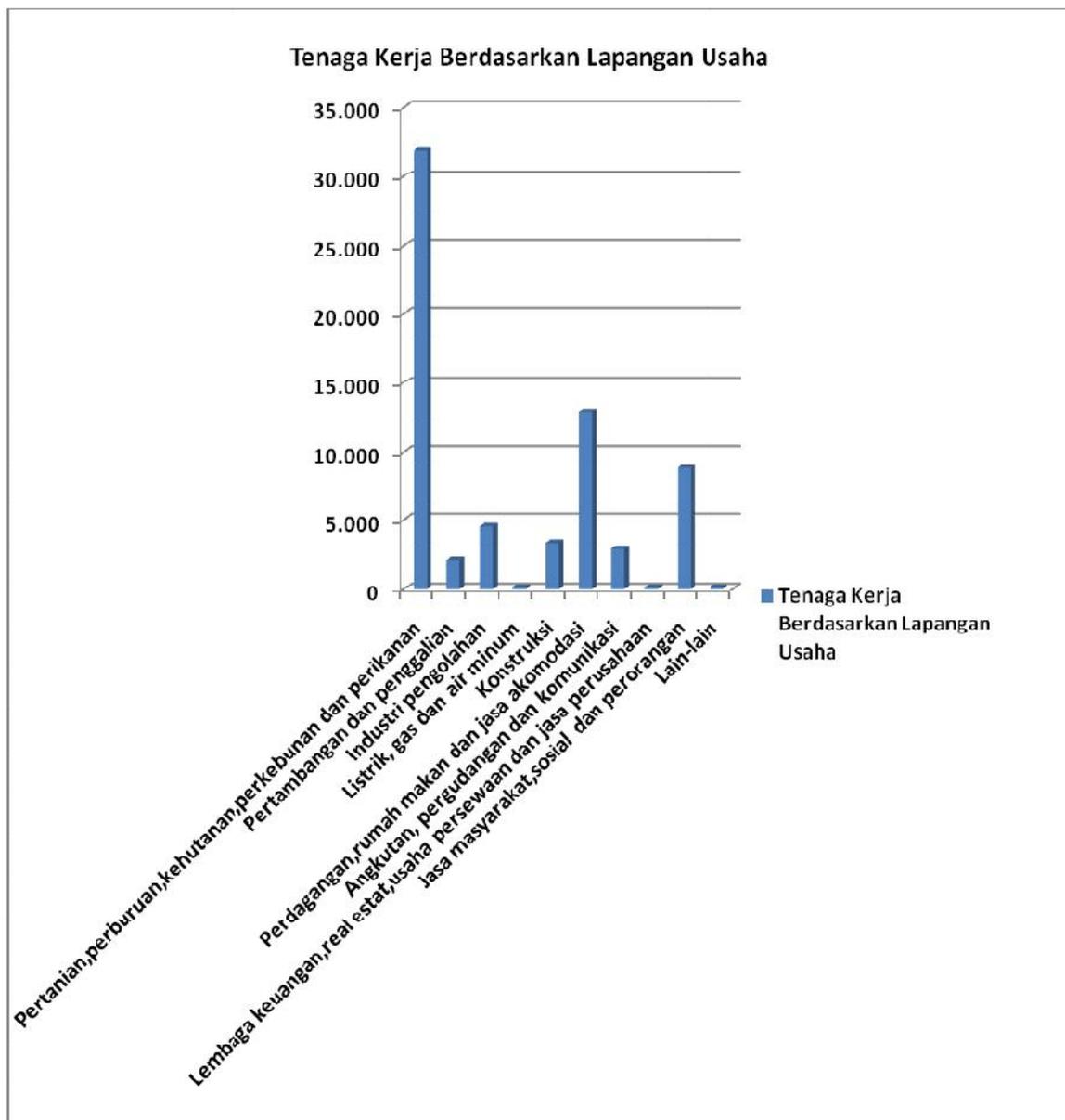
Grafik II.3 : Jumlah Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebanyak 31.891 orang, pertambangan dan penggalian sebanyak 2.112 orang, industri pengolahan sebanyak 4.543 orang, listrik, gas dan air minum sebanyak 155 orang, konstruksi sebanyak 3.376 orang, angkutan, pergudangan dan komunikasi sebanyak 2.948 orang, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 156 orang, jasa masyarakat, sosial dan perorangan sebanyak 8.785 orang dan lain-lain sebanyak 155 orang.

No.	Lapangan usaha	2011
1.	Pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan	31.891
2.	Pertambangan dan penggalian	2.112
3.	Industri pengolahan	4.543
4.	Listrik, gas dan air minum	155
5.	Konstruksi	3.376
6.	Perdagangan,rumah makan dan jasa akomodasi	12.913
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	2.948
8.	Lembaga keuangan,real estat,usaha persewaan dan jasa perusahaan	156
9.	Jasa masyarakat,sosial dan perorangan	8.785
10.	Lain-lain	155
Jumlah		67.034

Grafik II.4 : Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini berada pada angka 73,59 atau berada pada urutan ke 9 (Sembilan) se-Kalimantan Timur dan berada dibawah angka IPM rata-rata provinsi yaitu 75,56. Hal ini menunjukkan kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu ditingkatkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

Indikator kesejahteraan sosial dibidang pendidikan adalah angka melek huruf yang selalu cenderung meningkat dari 94,93 persen pada tahun 2009 menjadi 95,55 persen pada tahun 2010, ini menunjukkan penduduk buta aksara menurun menjadi 4,45 persen. Rata-rata penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan rendah (tidak/belum sekolah dan tamat SD sd. SLTP) prosentasenya semakin menurun dari sebesar 80,59 persen tahun 2009 menjadi 77,05 persen pada tahun 2010. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Namun demikian 4,45 persen penduduk yang masih "Buta Aksara" tetap menjadi Pekerjaan Rumah dari Pemerintah Penajam Paser Utara.

Indikator kesejahteraan sosial dibidang kesehatan adalah Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini adalah sekitar 71,32 tahun sedangkan provinsi sekitar 75,56. Hal ini perlu upaya peningkatan upaya penurunan mortalitas dengan pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk akan mempermudah pengendalian pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan ekonomi adalah pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada pada angka Rp. 630.910,- atau berada pada rangking ke 10 di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebesar Rp. 642.510. Untuk itu kebijakan pemerintah kabupaten harusnya dalam mengalokasikan anggaran sebaiknya mempertimbangkan parameter IPM khususnya untuk alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan untuk mempercepat kesejajaran dengan kabupaten/kota lainnya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dari hasil pelaksanaan pembangunan yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social, seni budaya dan olah raga yang mencakup urusan wajib.

a. Pendidikan

Kondisi kinerja layanan umum bidang pendidikan pada tahun 2011 mengalami perubahan yang positif, hal ini ditandai dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk

usia 7-12 tahun (SD/MI) Pada tahun 2010 sebesar 95,12 persen yang berarti sudah 95,12 persen penduduk usia 7-12 tahun di daerah ini yang bersekolah, namun masih terdapat 4,88 persen tidak bersekolah. Rasio ketersediaan sarana sekolah dasar terhadap penduduk usia 7-12 tahun sebesar 4,25 persen. Untuk pendidikan menengah atas angka partisipasi sekolah tahun 2010 sebesar 37,03 persen dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 16 – 18 tahun sebesar 2,05.

Meskipun telah terjadi peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas. Sebagian penduduk belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum merupakan bentuk investasi

Tabel II. 5 : Rasio Guru Per Siswa

Tahun	Rasio Guru		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK
2009	16	13	11
2010	15	11	11
2011	15	11	11

Sumber : Disdikpora

Tabel II.6 : Rasio Anak Usia Sekolah

Tahun	Anak usia sekolah		
	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun
2009	16.666	4.840	2.748
2010	17.058	5.184	3.014
2011			

Sumber : Disdikpora

Tabel II.7 : Sarana / Prasarana Pendidikan

Tahun	Jenis Sarana/Prasarana Pendidikan							
	RKB TK, SD, SMP Dan SMA	Perpustakaan SD, SMP & SMA, SMK	Lab. Bahasa SMP	Lab. Bahasa SMA	Lab. Bahasa SMK	Lab. Komputer SMP	Lab. Komputer SMA	Lab. Komputer SMK
2009	1200	136	3	2	3	5	4	4
2010	1291	136	3	2	3	5	4	5
2011	1340	65	4	3	3	6	6	5

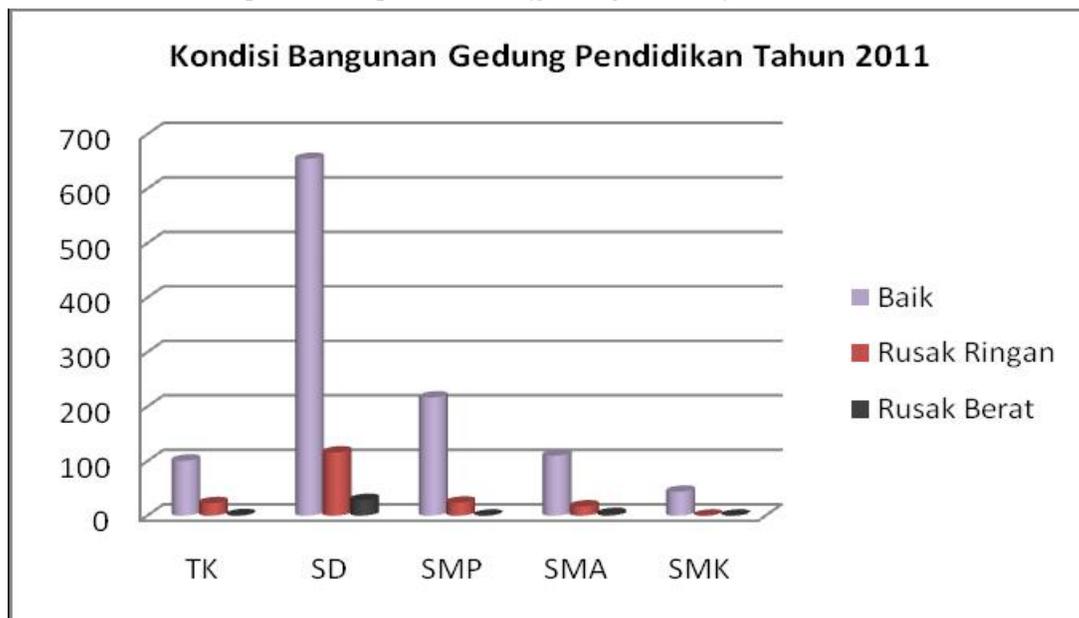
Sumber : Disdikpora

Tabel II.8 : Kondisi Bangunan Prasarana (Gedung) Pendidikan

Jenis Bangunan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK	96	10	4	101	23	1	101	23	1
SD	570	114	38	611	116	35	655	116	29
SMP	187	33	3	207	30	0	217	24	0
SMA	87	19	9	104	17	6	110	17	3
SMK	28	1	1	40	0	0	44	0	0

Sumber : Disdikpora

Grafik II.5 : Kondisi prasarana pendidikan (gedung sekolah) tahun 2011



b. Kesehatan

Salah satu aspek kesejahteraan sosial bidang kesehatan adalah perilaku hidup sehat, jika di lihat dari indikator pelayanan kesehatan. Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara telah menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan merata, hal ini dapat di lihat dari rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu per 1000 penduduk.

Tabel II.9 : Jumlah Sarana Kesehatan

Tahun	RSU	Puskesmas				Posyandu Tidak Aktif	Posyandu Aktif	Polindes
		Rawat Inap	Biasa	Pembantu	Keliling			
2009	2	8	3	44	12	0	244	34
2010	2	8	3	44	12	14	230	34
2011	2	9	2	46	12	5	239	38

Sumber: data dinas kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 mencapai 1965 dari 2966 kelahiran atau 66,24 persen menjadi 2617 persalinan yang tertangani oleh tenaga kesehatan dari 3018 persalinan atau 86,7persen di tahun 2011.

Tabel II.10 : Aspek layanan umum dalam bidang kesehatan

No.	Indikator	Tahun	
		2010	2011
1.	Rasio Posyandu Persatuan balita	14,37	18,62
2.	Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	0,48	0,39
3.	Rasio Dokter persatuan penduduk	0,36	0,29
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	66.24	86,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

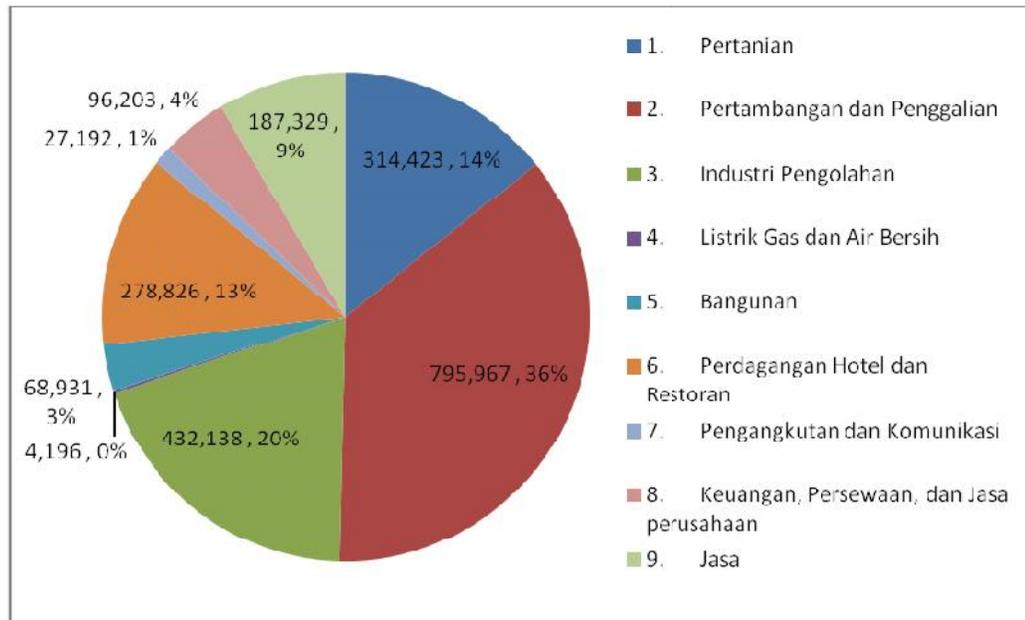
Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan hotel. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan hotel. Sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan jasa inilah yang akan terus dikembangkan sebagai aktivitas utama warga masyarakat.

Tabel II.11 : Aspek daya saing bidang kemampuan ekonomi daerah

No.	Uraian	2010	2011
1.	Pertanian	290.957	314.423
2.	Pertambangan dan Penggalian	758.515	795.967
3.	Industri Pengolahan	419.052	432.138
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	4.156	4.196
5.	Bangunan	60.234	68.931
6.	Perdagangan Hotel dan Restoran	289.878	278.826
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	24.585	27.192
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	79.989	96.203
9.	Jasa	182.802	187.329

Sumber : Kabupaten Dalam Angka

Grafik II.5 : Aspek daya saing bidang kemampuan ekonomi daerah



Sumber : BPS 2011 Diolah

b. Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota.

Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan jalur perlintasan poros Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, atau sebaliknya sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Kalimantan Timur. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki panjang jalan yang semakin meningkat. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan laut, yang hingga saat ini masih dalam pengerjaan dan diharapkan mampu menghubungkan seluruh kota di Indonesia.

Tabel II.12 : Aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah

Uraian	Tahun	
	2010	2011
. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3.71%	3.27%
- Panjang Jalan (Km)	961.54	996.44
- Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2	25.900	30.500
Jumlah Orang/ penumpang terangkut angkutan		
- Orang terangkut	464.129	324.280
Jumlah Orang/barang melalui dermaga		
- Orang	599.977	631.520

Sumber : Dishub dan PU Penajam Paser Utara

Penataan wilayah

Menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, penataan wilayah Kabupaten penajam paser Utara terbagi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu : Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. *Kawasan lindung* : meliputi kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam & cagar alam dan kawasan rawan bencana serta kawasan lindung geologi. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan mata air, sempadan waduk/danau, sempadan sungai, sempadan pantai secara umum dan sempadan pantai berhutan bakau. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor, dan banjir. Kawasan lindung geologi merupakan gerakan tanah dan kawasan cekungan air tanah.
2. *Kawasan Budidaya* : merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan Budidaya terdiri dari : kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya non kehutanan. Kawasan budidaya kehutanan merupakan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Sedangkan kawasan budidaya non kehutanan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertanian yang merupakan kawasan pertanian sawah, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman yang merupakan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan pemerintahan dan perkantoran. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan wilayah terdapat kompensasi yang tak bisa

dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan perkebunan, pertambangan, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran.

3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi : Kawasan hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel II. 13 : Rencana Luasan Pola Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2029

No.	Penggunaan Lahan	Satuan	Kecamatan			
			Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
Kawasan Lindung						
1	Cagar Alam	Ha	-	-	1.962,53	19.533,22
2	Sempadan Sungai	Ha	944,43	318,32	944,43	1.098,69
3	Sempadan Pantai	Ha	587,33	782,74	103,01	749,58
4	Hutan Mangrove / Bakau	Ha	11.423,79	-	4.237,86	17.325,63
Luas (Ha)			12.955,55	1.101,06	7.247,84	38.707,11
Kawasan Budidaya						
1	Hutan Produksi Tetap	Ha	66.313,18	25.392,53	-	28.579,12
2	Hutan Produksi Terbatas	Ha	-	-	-	35.800,10
3	Pemukiman	Ha	376,11	81,74	204,62	184,72
4	Pertanian	Ha	9.735,76	2.295,24	5.053,88	775,42
5	Perkebunan	Ha	15.155,84	12.734,93	12.404,02	1.066,40
6	Pertambangan	Ha	7.931,35	7.136,85	5.662,87	3.626,03
7	Area Penggunaan Lain	Ha	8.269,21	6.645,65	9.371,79	8.497,11
Jumlah			107.781,45	54.286,94	32.697,16	78.528,89

Sumber : Hasil Analisa dan Hasil Rencana

Ketersediaan air bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi sebagian Kecamatan yang ada di Kabupaten penajam paser utara dan terus dikembangkan Instalasi Pengolahan Air Minum Di Setiap Kecamatan. (non perpipaan), khususnya di wilayah yang belum memperoleh akses Layanan Air Bersih masyarakat masih mengelola sumur bawah tanah secara mandiri, seharusnya dihindarkan untuk menghindari dampak lingkungan yang terjadi. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk / embung lawe-lawe dan pembangunan Bendung Tengin Baru.

Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yang ada di tiap

kecamatan. Ketersediaan daya listrik saat ini belum memungkinkan bagi pengembangan investasi, kecuali bila Jaringan Listrik tegangan Tinggi telah terpasang.

Tabel II.14 : Aspek Daya Saing bidang Fasilitas Listrik dan Telepon

Uraian	Tahun	
	2010	2011
Rasio Ketersediaan Daya Listrik % (Persen)	64	72
- Daya Listrik Terpasang KW (Kilo Watt)	21.122	24.932
- Kebutuhan KW (Kilo Watt)	32.669,1	34.685,1
Persentase RT yang menggunakan Listrik	45.8	46.9
- Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	16.645	18.111
- Jumlah Rumah Tangga	36.299	38.539
Jumlah BTS telpon/ Seluler	52	52

c. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

d. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antar lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2011 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Mengingat Perda Kelembagaan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Belum Mendapat Persetujuan maka Pelayanan Perijinan masih dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Teknis . saat ini kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan belum maksimal sehingga diharapkan dengan disyahkannya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dapat meningkatkan kinerja utama pelayanan investasi daerah.

Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pos pajak daerah yang pelaksanaannya bendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22% pertahun. Pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah sebanyak Rp. 557.833.800,- sampai dengan tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 259%. Sedangkan jenis dan klasifikasi pengenaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru, mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak mampu segera diakomodasi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPД Tahun 2011

Visi Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 adalah ***Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan***, yang dijabarkan dalam 10 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai.
3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.

4. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan.
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.
7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi.
8. Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat.
9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
10. Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis.

Sasaran Pembangunan

Sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan Pembangunan **Kabupaten Penajam Paser Utara yang Mandiri**, sepanjang tahun 2008 – 2013 adalah:
 - a. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun
 - b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - e. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
 - g. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk
 - h. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan
2. Sasaran Pembangunan dari tujuan **Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang Produktif**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian

- c. Peningkatan kemandirian desa
 - d. Meningkatnya infrastruktur desa
 - e. Pembangunan infrastruktur daerah
 - f. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan
 - g. Mewujudkan pengelolaan struktur daya air dan listrik yang lebih baik
 - h. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor Riil
3. Sasaran dari tujuan ***Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai dan religius***, adalah :
- a. Meningkatkan iklim lingkungan yang kondusif
 - b. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana
 - c. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama antar umat beragama
 - d. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas

Berikut ini evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Misi 1:

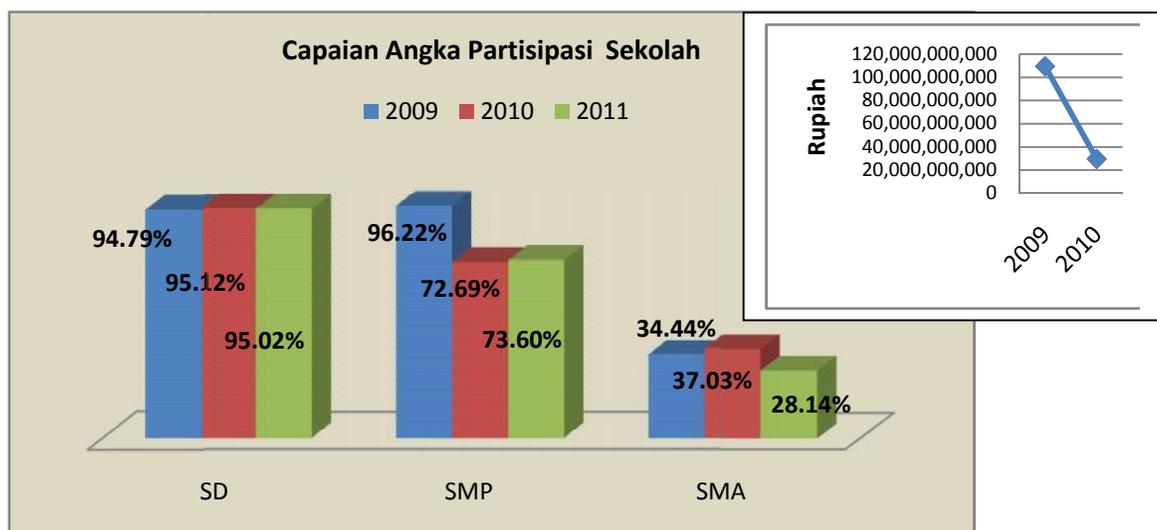
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional

Indikator Kinerja		Capaian Dasar Perencanaan (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional				
Program Prioritas : Program wajib belajar pendidikan dasar duabelas tahun				
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	SD	90.07%	95%	95.02%
	SMP	54.18%	73.65%	73.60%
	SMA	40.05%	64.87%	28.14%
Program Prioritas : Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				
1	Rasio Jumlah Siswa per Jumlah sekolah			
	SD	1:274	200	15
	SMP	1:12.76	20	11
	SMA	1:13.43	19	11
Program Prioritas : Program peningkatan pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah				
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	7.05%	15.05%	11%
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga	68%	79%	1%
3	Peningkatan peran serta kepemudaan	18%	8%	3%
4	Cabang olah raga yg berprestasi dan permasalahan Olah raga	10	18	6
5	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya	83	91	119

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun, dengan beberapa program-program yang dilaksanakan adalah:
 - a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - b. Program pendidikan menengah
 - c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Program pendidikan nonformal
2. Meningkatnya Pendidikan Kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah, melalui program:
 - a. Program peningkatan pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas) tahun
 - b. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
 - c. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
 - d. Program pemuda dan olah raga

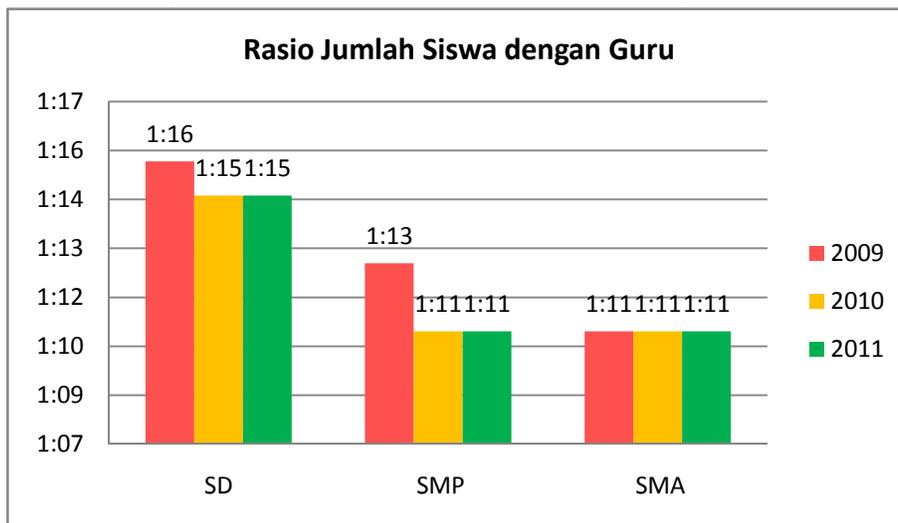
Grafik II.6 : Capaian angka partisipasi sekolah



Berdasarkan grafik terlihat bahwa:

1. Angka partisipasi sekolah pada tingkat SD dari tahun ketahun adalah stabil walaupun terlihat ada kenaikan pada tahun 2010 sebesar 0,33% dari tahun 2009 dan penurunan sebesar 0,10% pada tahun 2011.
2. APS pada tingkat SMP mengalami penurunan pada tahun 2010 hingga mencapai 23,53% dari tahun 2009, pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,91% dari tahun 2010, namun ini belum bisa dikatakan berhasil karena untuk menyamai capaian pada tahun 2009, capaian 2011 masih kurang 22,62%.
3. Capaian APS pada tingkat SMA, pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 8,89%.

Grafik II.7 : Rasio jumlah siswa dengan guru



Grafik II.8 : Peningkatan minat baca masyarakat



Grafik II.8 menggambarkan capaian minat baca masyarakat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun keseluruhan capaian tersebut masih belum dikatakan berhasil karena masih belum mencapai target RKPD 2011. Untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat ini, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai motivasi masyarakat dalam meningkatkan budaya membaca salah satunya adalah membentuk taman pintar atau perpustakaan keliling serta sosialisasi tentang pentingnya budaya membaca bagi masyarakat. Dimana konsep taman pintar ini tidak menimbulkan kejenuhan bagi para pembaca dengan usia yang variatif.

Grafik II.9 : Prosentase sarana dan prasarana olahraga



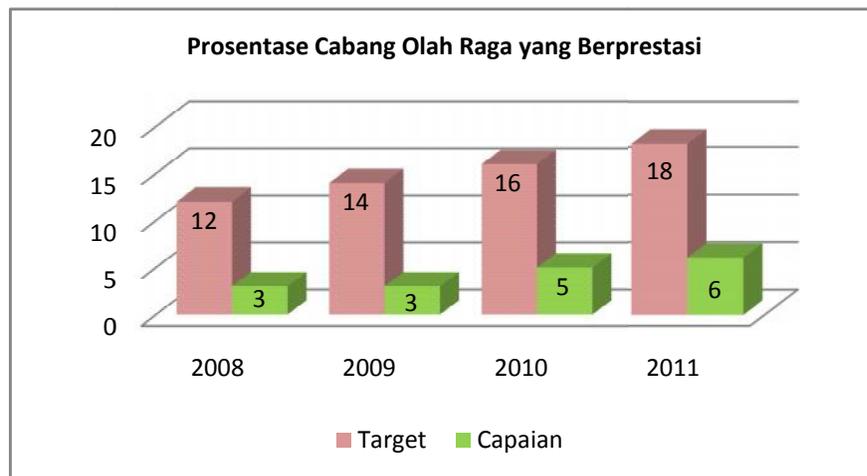
Grafik II.9 menggambarkan bahwa target RPJMD menyebutkan bahwa prosentase sarana dan prasarana olahraga yang disarankan dimiliki daerah adalah berkisar antara 73 – 79 pada rentan 4 (empat) tahun yaitu 2008 sampai dengan 2011, namun capaian 4 (empat) tahun ini tidak menunjukkan peningkatan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan tidak ada yang mencapai target RPJMD.

Grafik II.10 : Prosentase peran serta kepemudaan



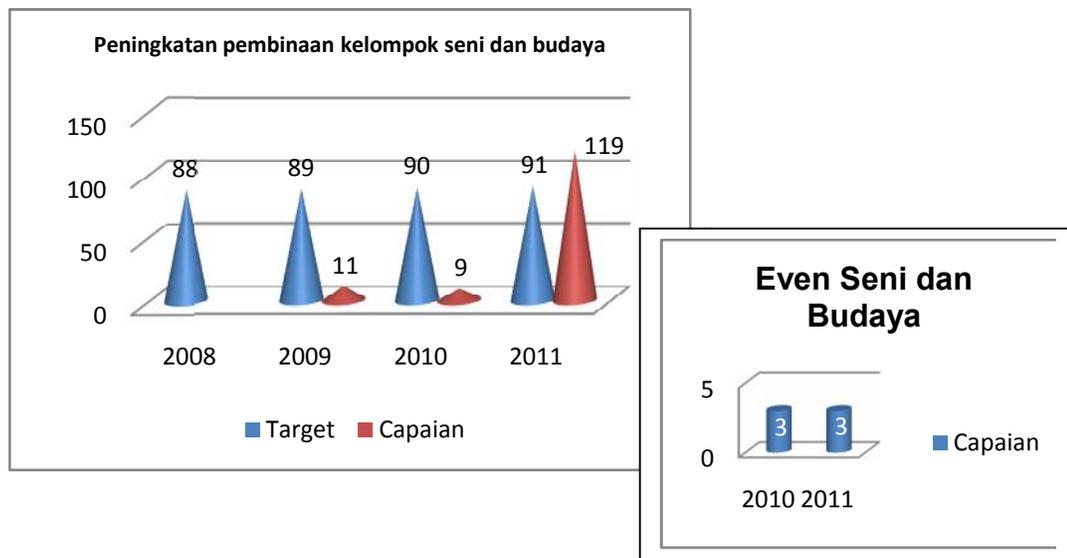
Berdasarkan grafik II.10 menggambarkan bahwa peningkatan peran serta kepemudaan belum dikatakan berhasil, karena nilai capaian belum memenuhi target RPJMD walaupun jumlah pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1% dari capaian tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya masih mengalami pengurangan nilai capaian sebesar 2%-5% mulai sejak tahun 2008-2011.

Grafik II.11 : Prosentase cabang olah raga yang berprestasi



Grafik II.11 menunjukkan nilai prosentase cabang olah raga yang berprestasi dianggap sudah mencapai target, artinya para olahragawan telah memberikan sumbangsih kepada daerah melalui kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki demikian juga dengan daerah yang telah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana olahraga.

Grafik II.12 : Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya



Grafik II.12 menunjukkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina masih jauh dari target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2011 capaian meningkat menjadi 119 kelompok seni dan budaya walaupun nilai ini masih jauh dari target yang ditentukan. Ini disebabkan karena daerah telah mampu memfasilitasi forum seni dan budaya.

Misi 2:

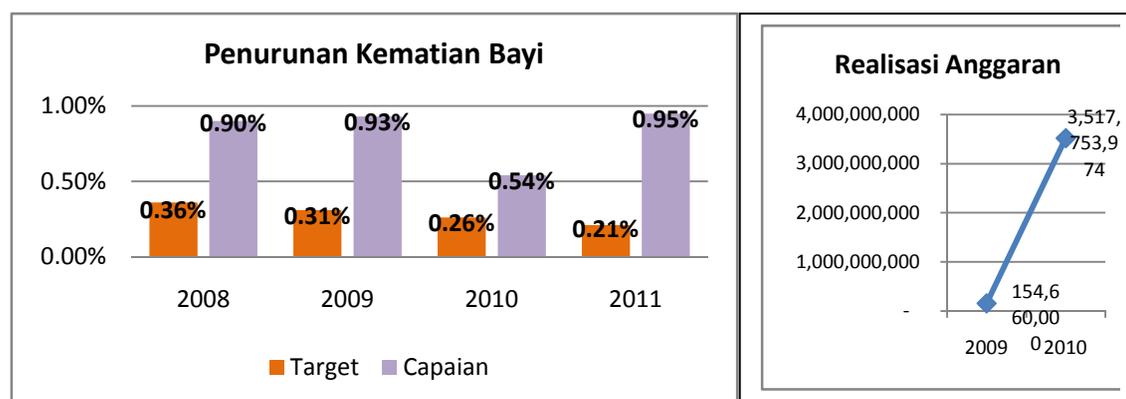
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai

Program prioritas dalam misi ini adalah:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
2. Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai				
Program Prioritas : Program peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata				
1	Penurunan Kematian Bayi	0.79	0.21%	0.95%
2	Penurunan kematian ibu melahirkan	0.07	0.06%	0.13%
3	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	66.8	67.5	72.7
4	Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan	64.09	62.14%	83%
5	Rumah tangga yang berperilaku sehat dan bersih		50%	30%
6	Prevelensi gizi buruk <5%		1%	0.1%
7	Prevelensi gizi buruk <20%		10%	1.3%
8	Daerah Bebas rawan gizi (%)	100%	100%	100%
Program Prioritas : Program Keluarga Sejahtera				
1	PUS yang menjadi peserta KB Aktif	63.95	87.68%	76.60%
2	Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)	0.89	0.21%	0.82%

Grafik II.13 Penurunan kematian bayi

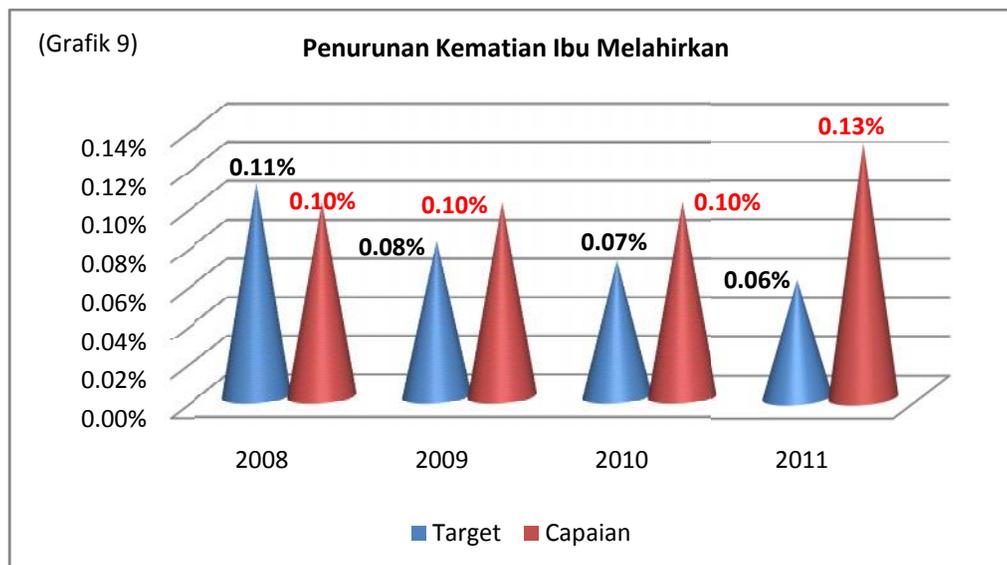


Berdasarkan grafik II.13 terlihat bahwa terjadi penurunan prosentase kematian bayi artinya bertambahnya jumlah bayi yang lahir mati. Dalam upaya mencapai keberhasilan, target yang ditetapkan terus mengalami penurunan, namun angka kematian bayi terus mengalami peningkatan mulai tahun 2008 - 2009. Penurunan terjadi pada tahun 2010 sebesar 0.39% dari tahun 2009, namun meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 0.41%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penurunan angka kematian bayi belum

dikatakan berhasil, karena belum mencapai target yang ditetapkan SKPD/Dinas fous pada target RPJMD.

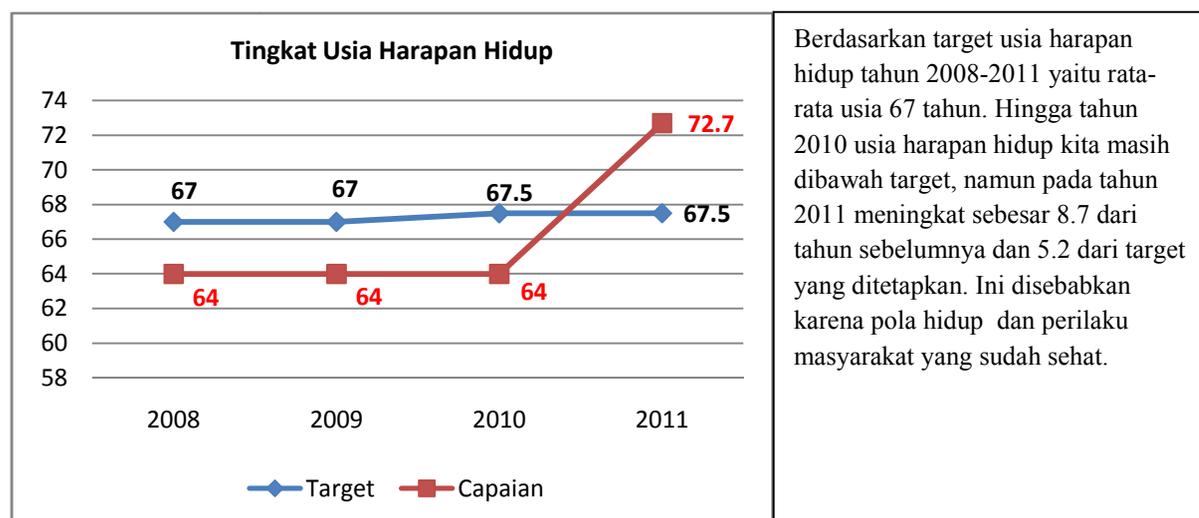
Program dan Kegiatan Tahun 2009	Program dan Kegiatan Tahun 2010
1. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (Penyuluhan kesehatan anak balita) 2. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita)	1. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (Penyuluhan kesehatan anak balita) 2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pengadaan vaksin untuk balita dan anak sekolah) 3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Peningkatan petugas imunisasi/jurim puskesmas) 4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (pelaksanaan imunisasi TT WUS)

Grafik II.14 : Penurunan kematian ibu melahirkan

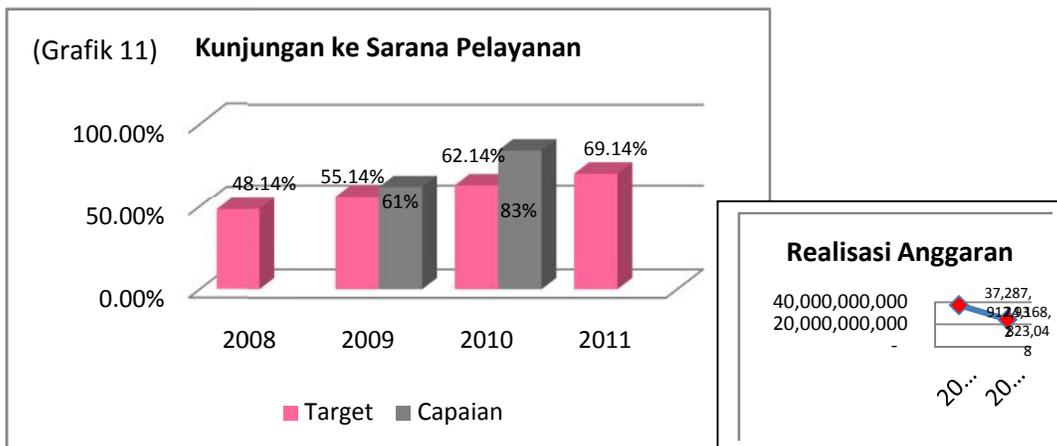


Secara umum Grafik-9 dapat menggambarkan bahwa penurunan kematian ibu melahirkan belum berhasil. Ini dibuktikan dari target yang terus menurun setiap tahunnya, namun kematian ibu melahirkan melebihi target yaitu sebesar 0.10% pada tiap tahunnya dan meningkat menjadi 0.13% pada tahun 2011. Artinya ada peningkatan kematian ibu melahirkan sebesar 0.03% dari tahun sebelumnya dan 0.07% dari target yang ditetapkan.

Grafik II.15 : Tingkat usia harapan hidup

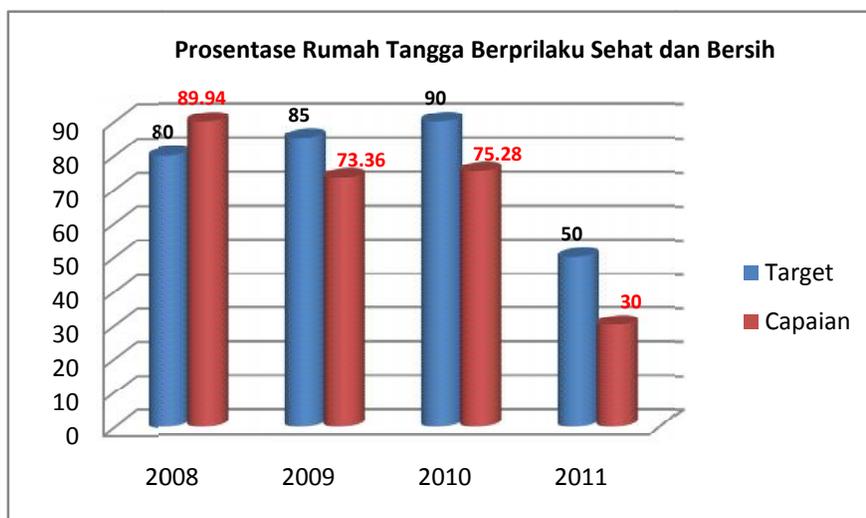


Grafik II.16 : Kunjungan ke sarana pelayanan



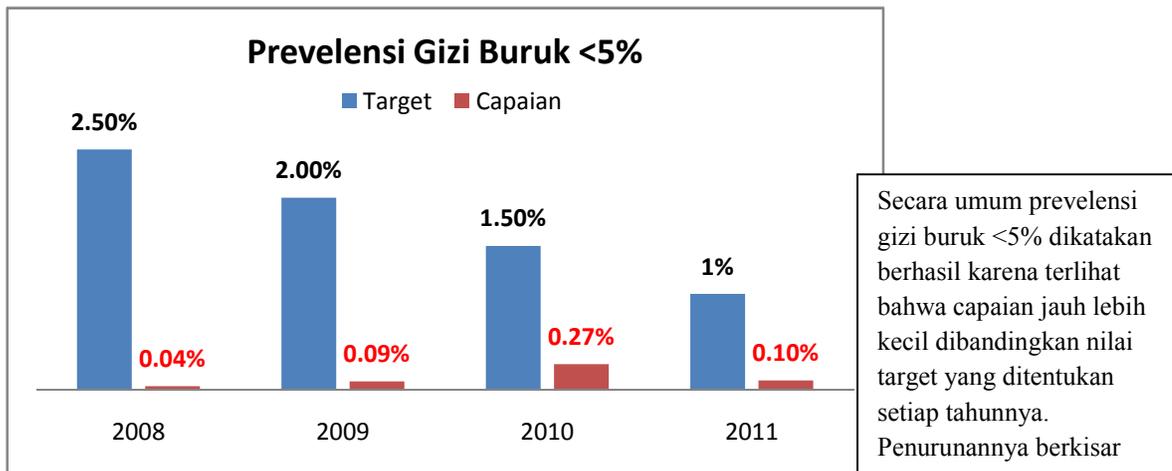
Grafik II.16 terlihat peningkatan kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan semakin meningkat jauh melebihi target, dibandingkan dengan realisasi anggaran yang semakin berkurang. Selisih nilai anggaran Rp. 13,119,089,884,- dapat mempengaruhi peningkatan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 22% dari tahun 2009, artinya sudah ada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengobatan dan penanganan kesehatan. Dengan demikian sudah dapat dikatakan berhasil, karena telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 20.86%.

Grafik II.17 : Prosentase rumah tangga berperilaku sehat dan bersih

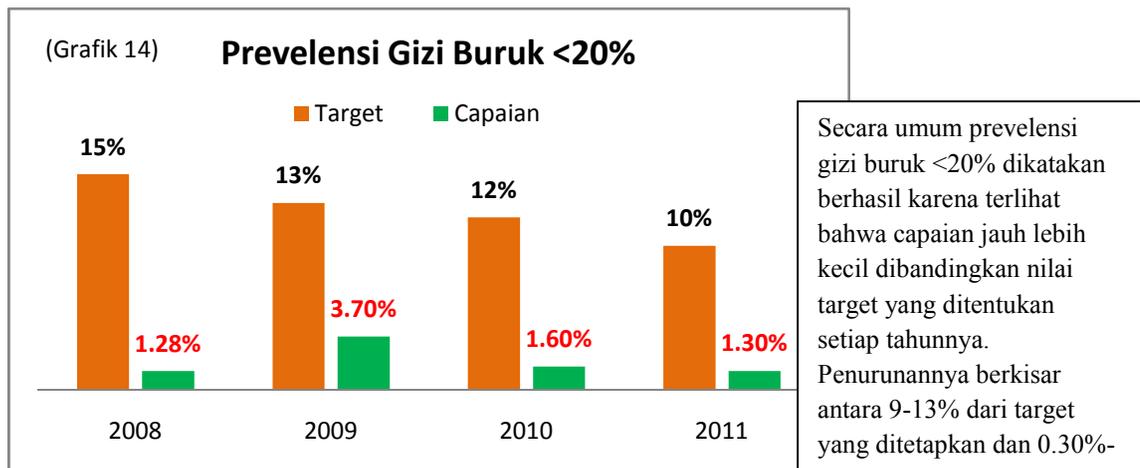


Grafik II.17 menggambarkan bahwa berdasarkan target yang terus meningkat, terlihat capaian naik-turun sepanjang tahun 2003-2013. Melihat perkembangan pada tahun 2010 dan 2011, terlihat bahwa terjadi penurunan target rumah tangga yang berperilaku sehat sebesar 40%, ini dibarengi pula dengan penurunan capaian sebesar 45.28%. Pencapaian rumah tangga yang berperilaku hidup sehat dan bersih belum dikatakan berhasil karena belum mampu mencapai target (kurang 20%).

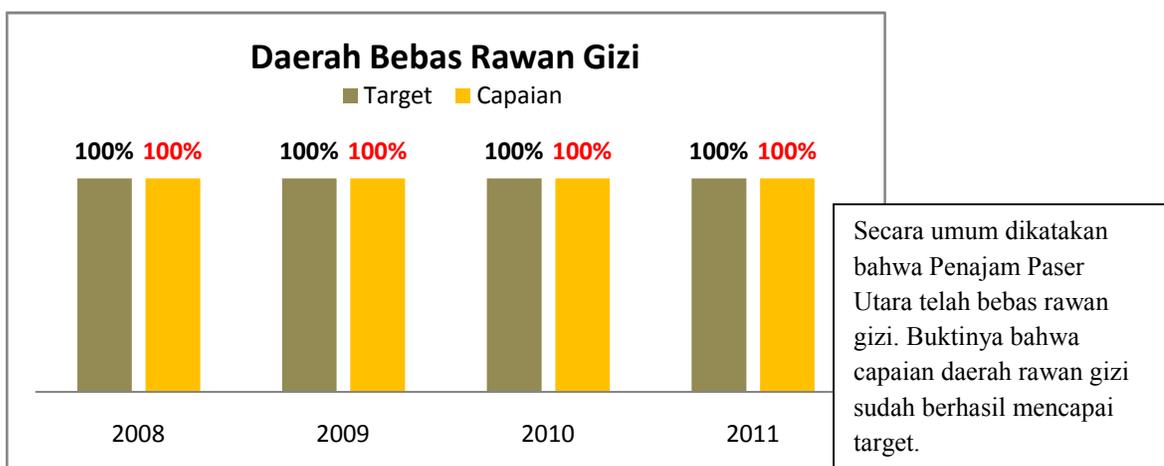
Grafik II.18 : Prevelensi guzi buruk < 5%



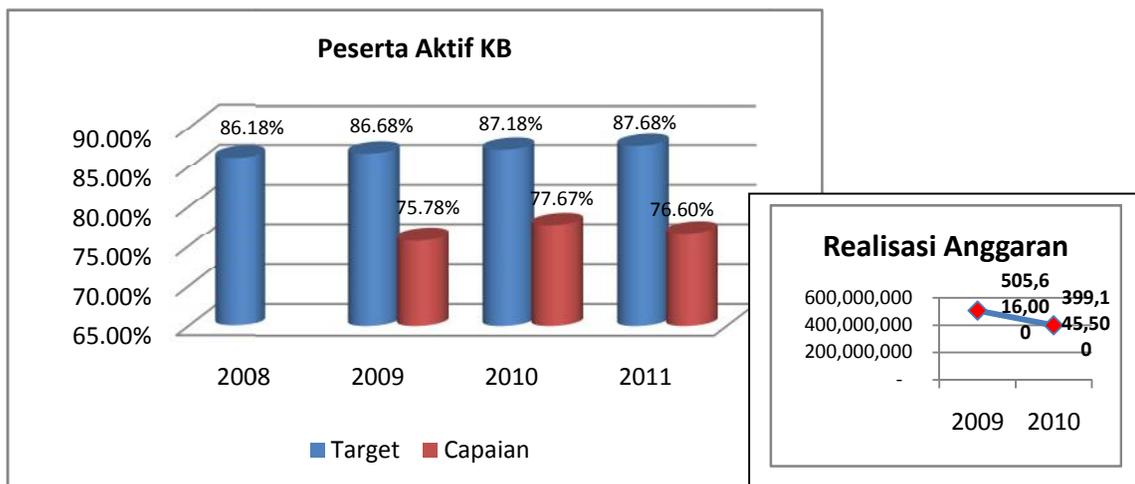
Grafik II.19 : Prevelensi gizi buruk < 20%



Grafik II.20 : Daerah bebas rawan gizi

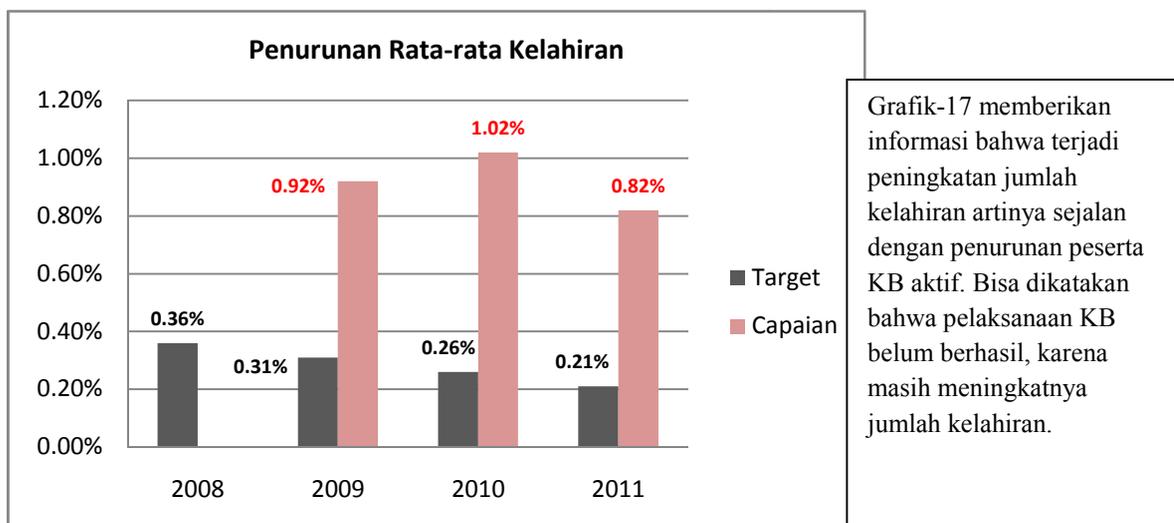


Grafik II.21 : Peserta aktif KB



Berdasarkan grafik II.21, diinformasikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di tahun 2010 sebesar 1.89% dari capaian tahun 2009, namun pada tahun 2011 mengalami sebesar 1.07% dari capaian tahun sebelumnya. Nilai tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu masih membutuhkan 11.08%. Besarnya nilai anggaran sepertinya tidak menjadi faktor penyebab, karena terlihat bahwa realisasi anggaran tahun 2009 yang lebih besar Rp. 106,470,500,- dari tahun 2010 justru memiliki capaian lebih kecil dari tahun 2010. Ini disebabkan karena peserta usia subur tidak mendaftarkan diri sebagai peserta KB melainkan menggunakan KB Kalender.

Grafik II.22 : Penurunan rata-rata kelahiran



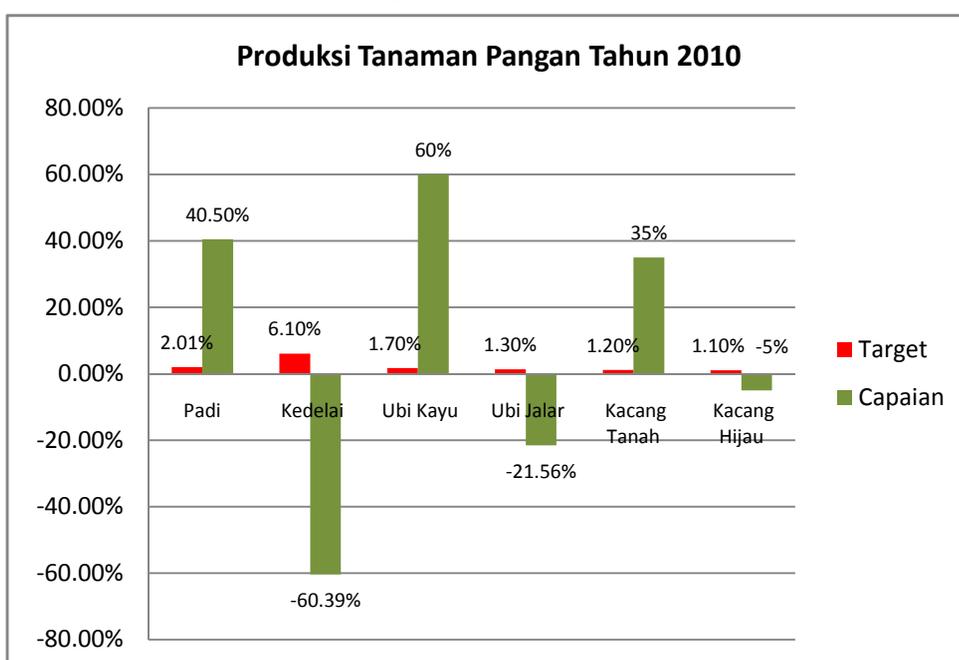
Misi 3

Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah

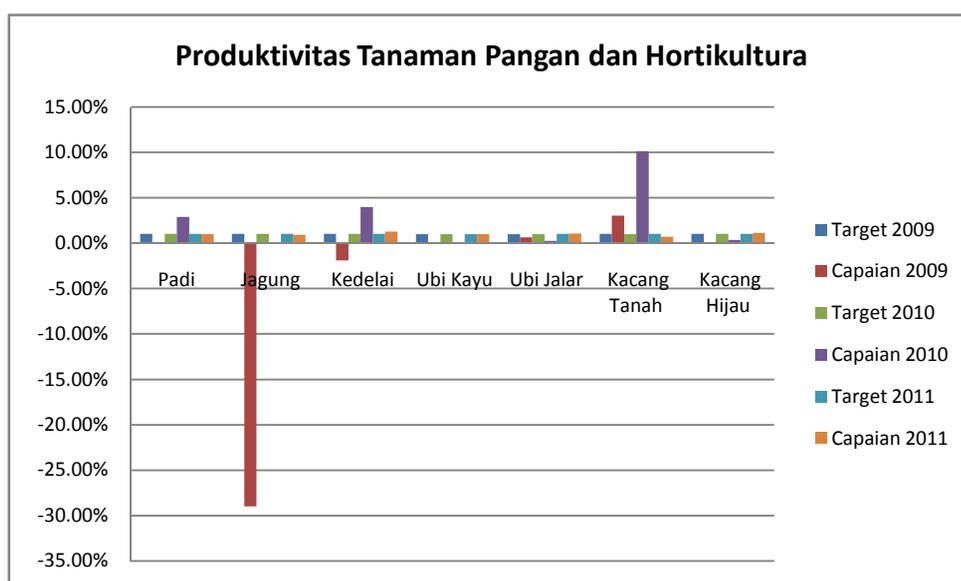
	Indikator Kinerja	Capaian Awal Perencanaan (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)
Misi 3 : Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah				
Program Prioritas : Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri				
1	Peningkatan Produksi tanaman pangan dan hortikultura			
	a. Tanaman Pangan			
	- Padi	78033 ton	2.05%	1.59%
	- Kedelai	16 ton	6.10%	28.04%
	- Ubi Kayu	4287 ton	1.70%	0.48%
	- Ubi Jalar	6459 ton	1.30%	0.22%
	- Kacang Tanah	87 ton	1.20%	0.46%
	- Kacang Hijau	69 ton	1.10%	0.29%
2	Peningkatan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura			
	- Padi	5.09 ton/ha	1.02%	0.98%
	- Jagung	2.09 ton/ha	1.04%	0.94%
	- Kedelai	1 ton/ha	1.04%	1.27%
	- Ubi Kayu	13.72 ton/ha	1.01%	1.01%
	- Ubi Jalar	9.39 ton/ha	1.04%	1.06%
	- Kacang Tanah	1.67 ton/ha	1.04%	0.70%
	- Kacang Hijau	1 ton/ha	1.04%	1.12%
3	Peningkatan Produksi perkebunan			
	- Kelapa Sawit	197227.3 ton	1.30%	2.24%
	- Karet	2703.50 ton	1.10%	2.64%
	- Kelapa	3037.7 ton	1.02%	0.83%
	- Kopi	115.4 ton	1.00%	0.49%
	- Lada	2266.7 ton	1.40%	0.70%
	- Kakao	145 ton	1.00%	0.34%
4	Peningkatan Produksi Perikanan			
	- Air tawar	228.6 ton	1.40%	1.48%
	- Air Payau	3984 ton	1.40%	1.42%
5	Peningkatan Produksi Sumber daya kelautan			
	- Perairan laut	4590.3 ton	1.20%	1.10%
	- Perairan laut lepas	551.4 ton	1.10%	0.54%
6	Peningkatan Populasi peternakan			
	- Sapi	7317 ekor	1.03%	3.74%
	- Kambing	3378 ekor	1.02%	3.77%
	- Ayam Buras	313139 ekor	1.03%	0.48%
	- Ayam ras	159534 ekor	1.03%	0.17%

7	Peningkatan Produksi Peternakan			
	-Daging			
	- Sapi	75600 kg	1.03%	3.74%
	- Kambing	3037 kg	1.02%	3.77%
	- Ayam	237975 kg	1.03%	0.48%
	- Telur			
	- Ayam Ras	15890 butir	1.003	146.70%
	- Ayam Buras	3150 butir	1.003	202.01%
	- Itik	254 butir	1.002	4480.44%

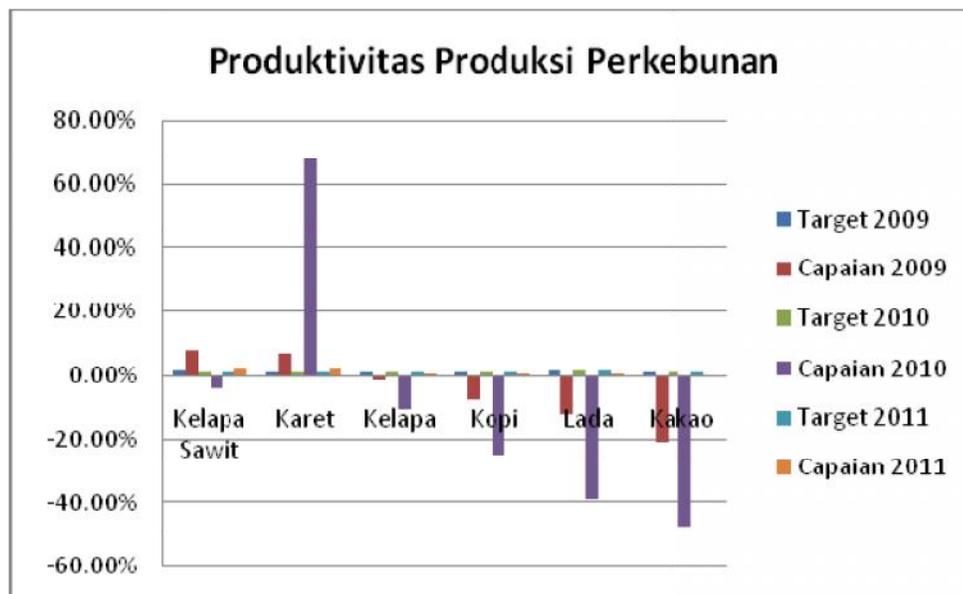
Grafik II.23 : Produksi tanaman pangan tahun 2010



Grafik II.24 : Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura



Grafik II.25 : Produktifitas produksi perkebunan



Rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan seperti kelapa sawit dan karet pada tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 capaian kinerjanya dianggap sangat berhasil. Namun demikian khususnya untuk tanaman seperti lada, kelapa dalam, kopi dan kakao dianggap kurang berhasil, dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih memprioritaskan komoditi kelapa sawit dan karet, bahkan beberapa masyarakat mengkonvensi lahan mereka dari lada, kakao, dan kopi menjadi kelapa sawit dan karet dengan alasan bahwa komoditi kelapa sawit dan karet lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit serta harganya relative lebih stabil (tidak terlalu fluktuatif).

Komoditi kelapa dalam produksinya cenderung menurun disebabkan oleh banyak tanaman yang sudah tua (tidak produktif lagi), berubah fungsi lahannya menjadi permukiman, tambak, sarana seperti jalan, bangunan pemerintah dan lain-lain. Banyaknya tanaman yang mati akibat terendam air laut disebabkan karena terbandung oleh bangunan jalan. Sedangkan komoditi kakao produksinya menurun disebabkan oleh perubahan fungsi lahan (konversi) dari kakao menjadi kelapa sawit. selain itu serangan hama penyakit yang sukar dikendalikan seperti Penyakit Buah Kelapa, babi hutan, tupai dan penyakit busuk buah.

Menurunnya produksi tanaman lada lebih disebabkan oleh banyaknya tanaman yang sudah tua dan alih fungsi lahan dan serangan hama penyakit lada, terutama busuk pangkal batang serta kesalahan dalam penggunaan pestisida pada saat penyiangan. Dan untuk tanaman kopi sendiri produksinya menurun disebabkan oleh konversi lahan, serangan hama dan penyakit serta turunnya minat petani karena secara ekonomis kurang menguntungkan dibanding kelapa sawit dan karet.

Kondisi Saat ini

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan perkebunan merupakan salah satu strategi dalam rangka pencapaian sasaran Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Produksi Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, selain dari sasaran Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian. Sapi perah yang ada dirumah potong hewan sebanyak 20 ekor mati 2, jadi yang hidup 18 ekor atau 90 %. Dari 20 ekor sapi perah tersebut telah lahir 11 ekor sapi yang terdiri dari 7 ekor sapi perah jantan dan 4 ekor sapi perah betina. Hasil yang dicapai dari revitalisasi mencapai 90 % tingkat keberhasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang hanya tingkat keberhasilannya mencapai 10 %. Demikian juga halnya dengan kambing perah yang jumlahnya 20 ekor keberhasilannya 100 % , kambing perah tersebut telah melahirkan 21 ekor, dari jumlah tersebut mati 11 ekor jadi sisa anaknya 9 ekor yang masih hidup.

Produksi pertanian tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,46 % (18.868 ton) dari target awal tahun 2011 sebesar 2,05% (84.564,84 ton) terealisasi sebesar 1,59 % (65.697 ton) walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 142.922 jiwa masih mengalami surplus sebesar 49.547 ton. Selain padi, secara umum produksi tanaman pangan mengalami penurunan yang diakibatkan terjadinya penurunan curah hujan (kekeringan) sehingga sebagian besar tanaman mengalami puso pada musim tanam (bulan Maret – Juni) dan luas panen yang mengalami penurunan.

Disamping itu rasio investasi harus naik dari 16,0 % pada tahun 2004 menjadi 24,4 % pada tahun 2009, dan rata-rata pertumbuhan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan mencapai 3,5 %. Pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan memegang peran sangat penting dalam pencapaian target-target tersebut mengingat peran keempat kegiatan tersebut signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu terkait dengan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, terdapat pula sektor strategis lain seperti ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pembangunan pedesaan.

Tantangan

Pertama adalah Penguasaan dan Pengusahaan Lahan. Masalah lahan ini tidak saja berkaitan dengan kepemilikan lahan tetapi juga pengusahaan lahan dan legalitas.

Permasalahan peningkatan produksi pertanian terjadi karena pengusahaan lahan terindikasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan non pertanian tanaman pangan (perkebunan, pemukiman, pertambangan, dll). Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor produksi (benih, pupuk, pestisida) dan teknologi tepat guna.

Kedua adalah Degradasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Permasalahan peningkatan produktivitas pertanian tidak saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan menurunnya kualitas tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Degradasi sumber daya alam terjadi akibat dua hal, faktor manusia dan faktor alam. Degradasi tersebut sering dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor manusia itu sendiri. Dari sisi manusia, masalah degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura misalnya, salah satu permasalahan dalam peningkatan produktivitas petani dan pertanian adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah. Hal ini dicirikan dengan kandungan bahan organik tanah yang kurang dari 2 persen, sementara yang ideal adalah 5 persen. Selain itu pencemaran lingkungan juga menyebabkan memburuknya kualitas air yang menjadi sumber pengairan lahan pertanian. Masalah pencemaran lingkungan juga menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Tingginya pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian alam mengakibatkan tingginya sedimentasi atau pendangkalan air sungai, maraknya praktek penggalian pasir laut, menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem laut dan menurunnya kualitas sumber daya perikanan. Hal serupa juga terjadi pada sub sektor kehutanan. Penebangan hutan yang berlebihan dan perambahan hutan menyebabkan semakin banyaknya lahan-lahan kritis dan pada gilirannya pula menyebabkan sulitnya meningkatkan produktivitas kehutanan.

Ketiga adalah masalah Perubahan Iklim. Perubahan iklim juga menjadi permasalahan tersendiri bagi peningkatan produktivitas pertanian.

Perubahan iklim global mempengaruhi setidaknya tiga unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian, yaitu : (a) naiknya suhu udara yang juga berdampak terhadap unsur iklim lain terutama kelembaban dan dinamika atmosfer, (b) berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti El-nino dan La-nina, dan (c) naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di kutub utara. Peningkatan suhu akibat perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, terutama tanaman semusim dan meningkatnya serangan hama penyakit. Selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan banjir, juga menjadi penyebab penciptaan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal pertanaman yang gagal panen, terutama tanaman pangan dan tanaman semusim lainnya. Sebagai gambaran, satu kali kejadian El-Nino (dengan skala lemah hingga sedang) dapat menurunkan produksi padi nasional sebesar 2-3 persen. Jika iklim ekstrim

diikuti oleh peningkatan suhu udara maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi. Sementara itu, naiknya permukaan air laut juga menyebabkan semakin terbatasnya lahan pertanian serta menurunnya kualitas tanah pertanian. Naiknya air laut menyebabkan semakin banyak lahan pertanian yang terendam air laut dan pada akhirnya menyebabkan peningkatan salinitas (kegaraman) tanah pertanian. Salinitas pada tanah bersifat racun bagi tanaman sehingga mengganggu fisiologis dan fisik pada tanaman. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai garis dan hamparan pantai yang sangat panjang, sehingga penciutan lahan pertanian akibat peningkatan permukaan air laut menjadi hal yang harus kita perhatikan.

Keempat, Keterbatasan Infrastruktur. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen yang sangat penting baik dalam pembangunan pedesaan secara umum maupun dalam usaha tani secara khusus. Dengan kata lain, infrastruktur memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu infrastruktur yang secara langsung berdampak terhadap usaha tani adalah irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ketingkat usaha tani. Sekitar 718 hektar areal lahan beririgasi setengah teknis dan 967 hektar irigasi sederhana yang telah berfungsi namun belum optimal. Sementara itu dari 718 hektar areal irigasi setengah teknis yang telah dibangun seluruhnya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Infrastruktur berikutnya yang krusial bagi peningkatan produktivitas usaha tani adalah prasarana jalan dan transportasi. Akses masyarakat pedesaan terhadap jalan yang menghubungkan pedesaan dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran produk pertanian juga masih belum memadai. Demikian pula dengan prasarana pendukung baik untuk infrastruktur jalan maupun transportasi lainnya seperti pelabuhan. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan biaya dan efisiensi usaha tani.

Kelima, Keterbatasan Akses Permodalan. Di satu sisi akses permodalan melalui kredit perbankan mempersyaratkan adanya agunan sebagai suatu bentuk penjaminan atas kredit yang disalurkan. Kesulitan petani umumnya untuk memperoleh akses permodalan dari sektor perbankan adalah status kepemilikan lahan petani yang masih sedikit sekali didukung oleh legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat kepemilikan sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Selain itu juga keterbatasan akses permodalan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang permodalan melalui perbankan.

Keenam, Kelembagaan Pertanian di Pedesaan. Faktor kelembagaan ini memiliki 2 dimensi, yaitu kelembagaan pedesaan sebagai wilayah petani dan pertanian bermukim serta kelembagaan tani itu sendiri. Dari sisi kelembagaan pedesaan, masalah lemahnya kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kelembagaan pedesaan. Ketidakmandirian desa bersumber pada beberapa hal, misalnya keterbatasan aset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal, serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah. Sementara itu perencanaan pembangunan desa belum optimal karena kapasitas desa yang masih terbatas dan belum bersinergi dan terintegrasinya program-program pemberdayaan dari pemerintah dengan perencanaan desa tersebut. Di sisi yang lain, kelembagaan atau organisasi petani juga belum berjalan secara optimal. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Sementara itu, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis.

Ketujuh, Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengembangan teknologi tepat guna bagi pertanian tentunya banyak dilaksanakan di berbagai institusi baik instansi teknis pemerintah maupun instansi akademik dan penelitian pengembangan (litbang). Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mentransfer dan mensosialisasikan berbagai invensi dan inovasi kepada para petani. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia pelaku usahatani yaitu petani itu sendiri. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat. Angka melek huruf di pedesaan untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas 15,47 persen dan rata-rata lama sekolah hanya mencapai 9 tahun (BPS, 2011). Rendahnya kualitas SDM pedesaan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sementara itu juga terdapat kecenderungan bahwa penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik justru banyak bermigrasi terutama ke daerah perkotaan dan tentunya beralih pada sektor-sektor lainnya selain sektor pertanian.

Pada tantangan revitalisasi lahan dimana didalamnya mencakup upaya-upaya perluasan lahan pertanian, penguatan status kepemilikan lahan petani, sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan pertanian serta upaya-upaya peningkatan kesuburan tanah dan perbaikan kondisi lahan pertanian. Dari sini dapat dilihat lahan-lahan mana saja yang dapat dioptimalkan untuk memperluas lahan pertanian yang sudah ada. Lebih luas lagi, optimalisasi lahan pertanian perlu didukung

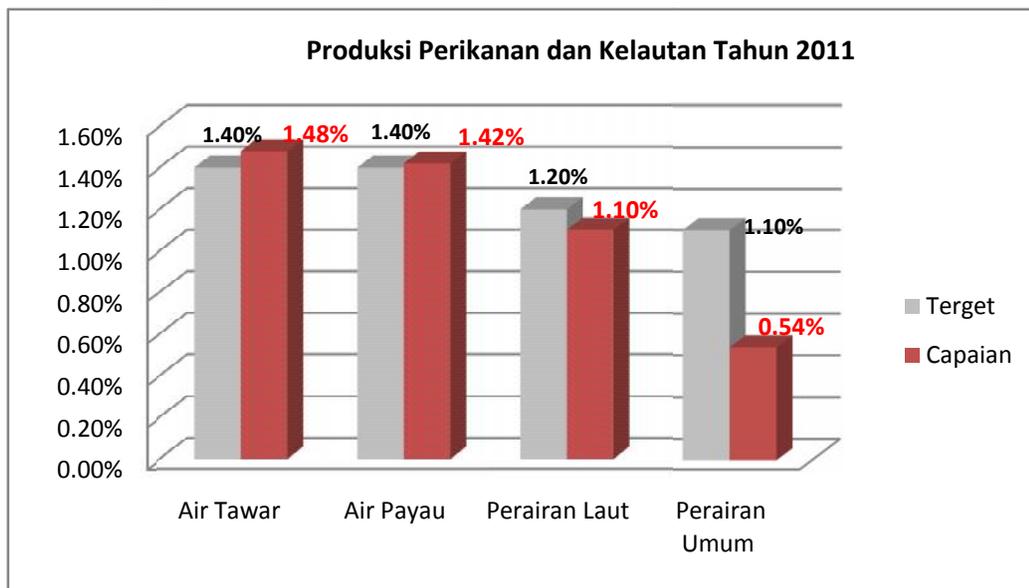
oleh peningkatan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Dari beberapa uraian permasalahan di atas jelas bahwa terdapat permasalahan yang cukup mendasar dalam pembangunan pertanian khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas petani dan pertanian yang pada gilirannya diharapkan mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani. Sementara itu dalam RPJMD 2008-2013 telah ditetapkan “Mewujudkan Revitalisasi Pertanian Yang Berkelanjutan Untuk Menciptakan Ketahanan Pangan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.

Kebijakan

Disadari bahwa permasalahan yang dihadapi sektor berbasis sumberdaya alam di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Penajam Paser Utara pada khususnya semakin banyak dan kompleks yang harus dipecahkan di luar sektor yang bersangkutan, maka pembangunan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui kebijakan di dalam sektor pertanian, tetapi juga harus dengan kebijakan untuk pertanian. Oleh sebab itu Revitalisasi Pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang merupakan tekad dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong dan memajukan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, sekaligus suatu kebijakan dan strategis umum yang komprehensif, memadukan pandangan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek, dan diharapkan dapat menjadi pemandu untuk menerapkan berbagai kebijakan operasional lintas SKPD yang terkoordinasi. Komitmen ini juga menyertakan dunia usaha dan kalangan petani/nelayan/petani-kebun sendiri, serta akademisi dan lembaga masyarakat, baik dalam penyusunannya dan dalam proses implementasinya. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak yang terkait akan menjadi faktor yang sangat menentukan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam mewujudkannya menjadi langkah bersama demi kesejahteraan rakyat.

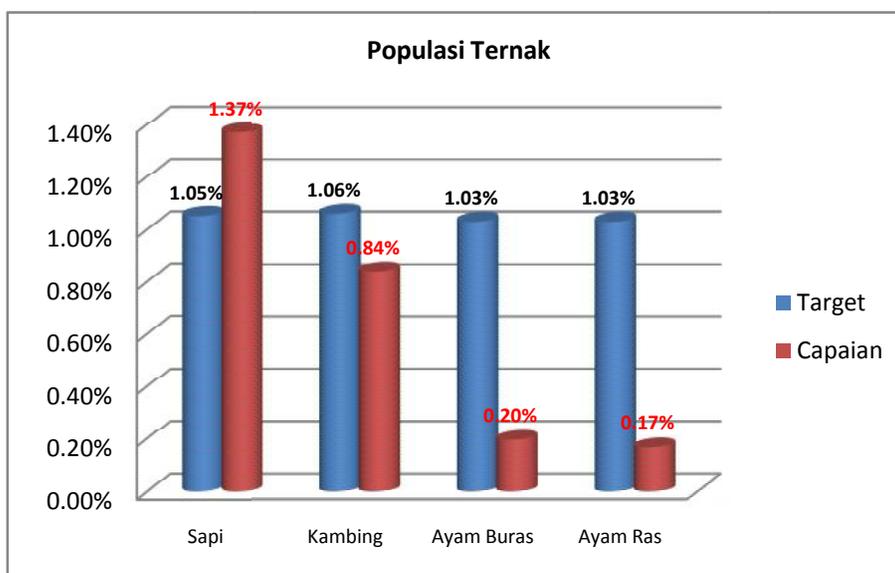
Pemberdayaan kelompok peternak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan sapi perah dan kambing perah ini untuk memperoleh gaduhan supaya ada peningkatan pendapatan peternak selain pengolahan susu juga ada dari hasil olahannya. Untuk komoditas padi (sawah+ladang) : Produksi tertinggi Kutai Kartanegara yaitu 210.203 ton, Penajam Paser Utara pada urutan kedua sebesar 87.875 ton.

Grafik II.26 : Produksi perikanan dan kelautan tahun 2011



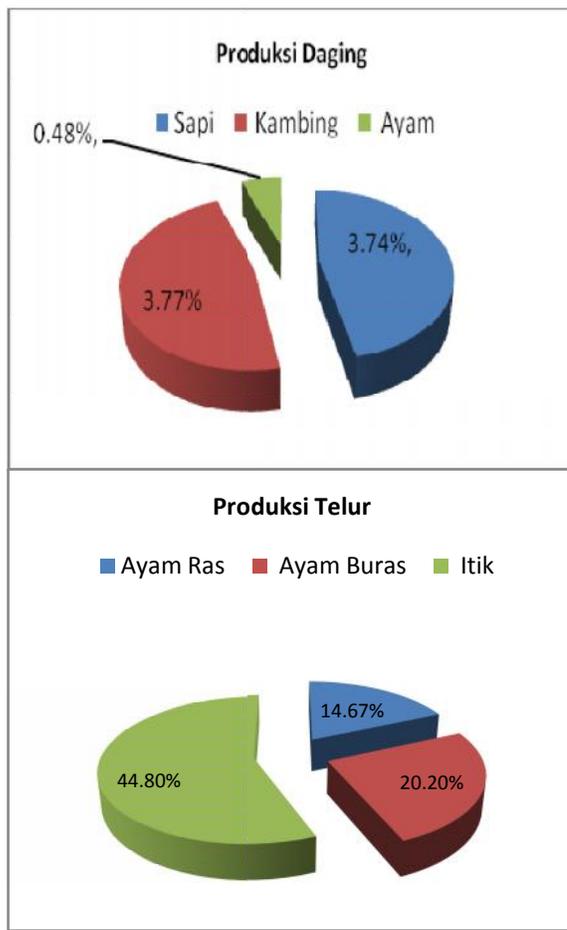
Grafik-26 menggambarkan bahwa ketidakberhasilan produksi perairan laut dan perairan umum. Ini dibuktikan dengan selisih capaian dengan target yang ditetapkan pada produksi perairan umum, yaitu sebesar 0.56%. Produksi perairan laut bisa dikatakan hampir mencapai target karena hanya memiliki selisih 0.10% saja.

Grafik II.27 : Populasi ternak



Berdasarkan grafik II.27 terlihat bahwa prosentase populasi ternak jenis kambing, ayam buras dan ayam ras belum mencapai target, selisih pencapaian target berkisar antara 0.22%-0.86%. Ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang mati akibat penyakit dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeliharaan ternak atau unggas.

Grafik II.28 : Prosentase produksi peternakan (daging dan telur)



Grafik II.28 menggambarkan bahwa keselarasan antara jumlah produksi ternak dengan produksi daging namun tidak selarasan dengan jumlah produksi telur pada unggas. Ini terlihat pada produksi Ayam. Jumlah produksi ayam mengalami penurunan dibarengi dengan jumlah produksi daging ayam, namun jumlah produksi telur meningkat tetapi tidak banyak dibanding dengan produksi telur itik.

Misi 4:

Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat

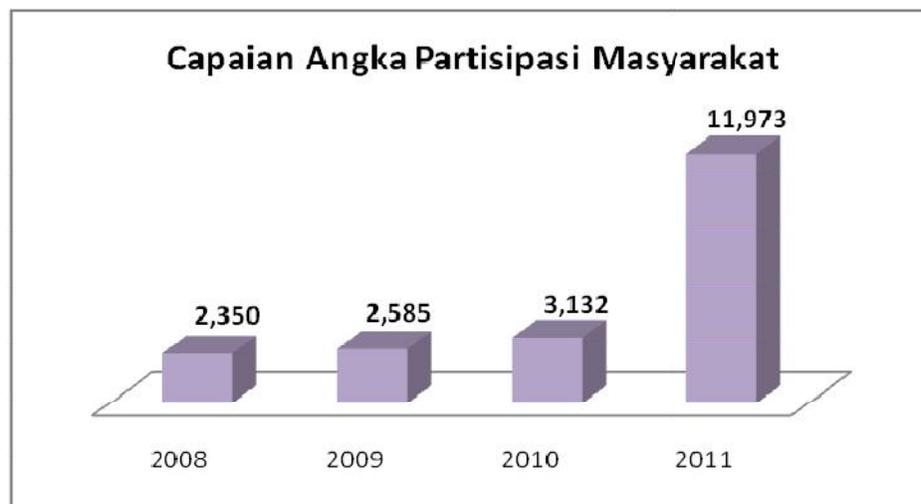
	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)
Misi 4 : Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat				
Program Prioritas : Program Pengembangan Ekonomi lokal partisipatif				
1	Dana Partisipasi Pembangunan		1.50%	85,278,600
2	Peningkatan Angka Partisipasi masyarakat dari Tahun sebelumnya		1.50%	21%
3	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		30	30
4	Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS (Penurunan keluarga Pra Sejahtera)		170	144

Peningkatan angka partisipasi masyarakat jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya meningkat hingga 10%, ini karena program pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik contohnya pelaksanaan PNPM. Selain itu Nilai capaian pada program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa tahun 2009 mencapai 203,396,951,- dan meningkat menjadi 310,958,900,- sama halnya dengan program sentra-sentra industri potensial dengan indikator peningkatan angka partisipasi masyarakat di tahun sebelumnya mencapai nilai 234,900,000,- pada tahun 2010 dengan penambahan nilai capaian sebesar 41,025,000,-.

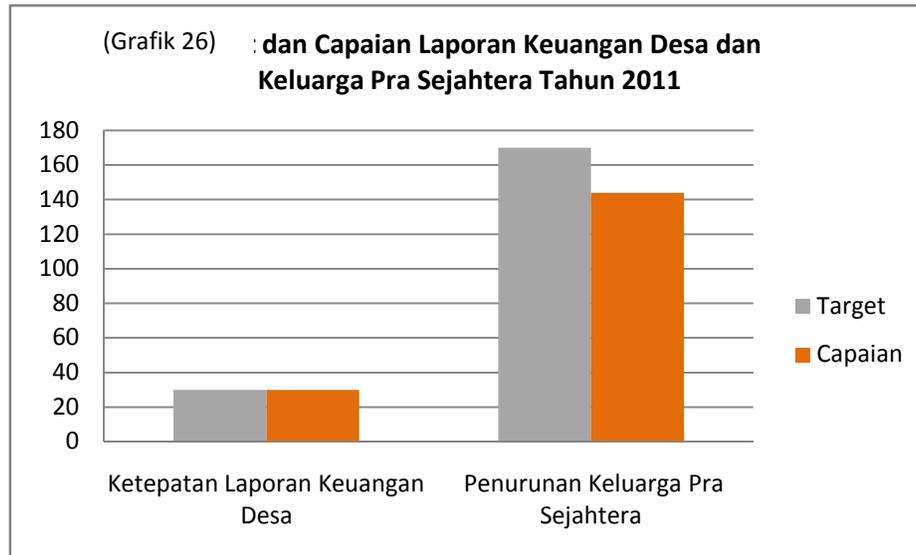
Grafik II.29 : Capaian dana partisipasi pembangunan



Grafik II.30 : Capaian dana partisipasi pembangunan



Grafik II.31 : Target dan capaian laporan keuangan desa dan keluarga pra sejahtera tahun 2011



Misi 5:

Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

Indikator Kinerja		Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2010)	Capaian (2010)
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian				
Program Prioritas : Program pengembangan Infrastruktur dan prasarana wilayah				
1	Peningkatan rasio jembatan yang baik	30	30	17
		30	30	44
2	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas		15	15
			9	9
3	Peningkatan jumlah fasilitas Umum yang terbangun		0,06%	0,25%
4	Peningkatan jaringan irigasi utama yg baik		0,02%	40%
5	Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg baik		1,22%	1,20%
6	Pencapaian taget pembangunan bangunan pengendali banjir		1,22%	40%
7	Pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air	36/40	38/40	37/40

Gambaran mengenai peningkatan jalan dan jembatan

Peningkatan Jalan Babulu Darat-Rawa Sebakung-Sekunder Gg Ali-Rawa Mulia-Babulu Laut tersebut merupakan salah satu jalan akses yang menghubungkan Babulu Darat – Rawa Sebakung - Babulu Laut - Gunung Makmur. Pada STA 0+000 hingga STA 3+700 kondisi jalan yang ada sudah beraspal (lapen) yang sebagian lokasi berlobang, pada STA 3+700 hingga STA akhir kondisi jalan masih LPB dan sebagian berlobang dan tidak rata.

Pada link Babulu Laut arah Labangka sudah dibuatkan jembatan Permanen. Pada link Babulu Laut – Rawa Mulia terdapat 7 unit titik jembatan yang mengalami rusak berat, akibat dari desakan arus sungai di Handil Bandeng.



Kondisi Jalan yang telah selesai di Babulu Darat.



Kondisi Jembatan di STA 0 + 100 di Babulu Darat

Permasalahan di lapangan

- Pada jalan pada daerah Sebakung Jaya pada bagian kanan jalan terdapat saluran primer yang menggerus badan jalan sehingga harus diberikan penanganan lebih lanjut.
- Pada link Babulu Laut-Rawa Mulia ketinggian air laut pada saat pasang melebihi badan jalan yang ada ± 30 cm (informasi warga).



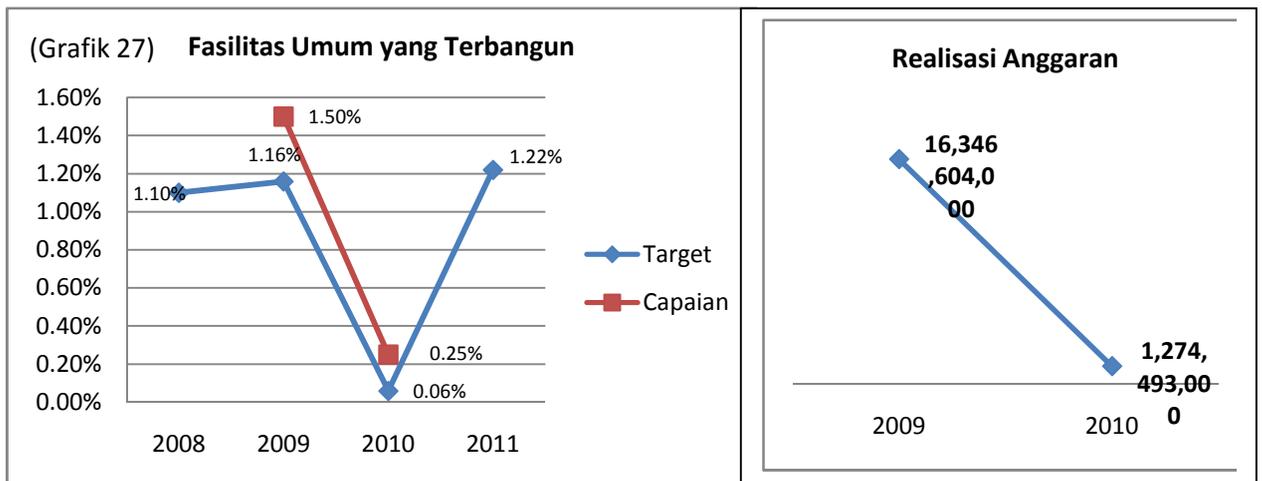
Kondisi Jembatan dan Jalan yang Rusak Berat akibat air pasang di Babulu Laut.



Kondisi badan Jalan yang tergerus akibat air pasang di Babulu Laut

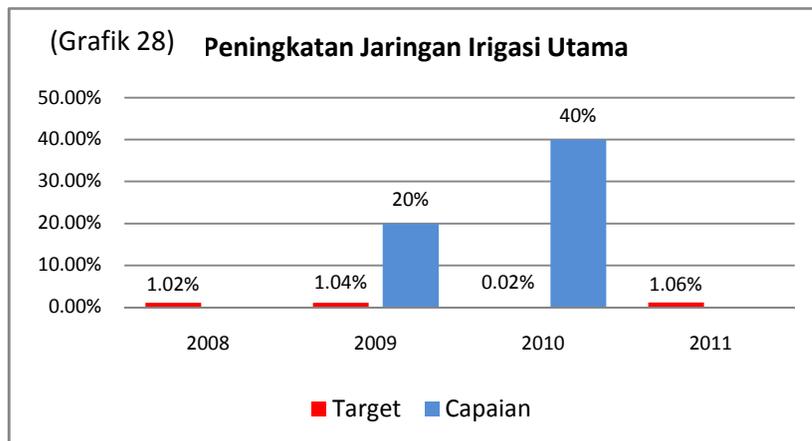
- Perlu penanganan lebih serius terhadap saluran primer di daerah Sebakung Jaya yang apabila tidak diperhatikan dapat menggerus badan jalan.
- Pada link Babulu Laut–Rawa Mulia perlu dilakukan penanganan terhadap saluran primer Handil Bandeng dengan melakukan normalisasi saluran, mengurangi bukaan lahan pada daerah bakau dan penanaman bakau, sebagai sabuk hijau pada sepanjang daerah garis pantai.

Grafik II.32 : Fasilitas umum yang terbangun

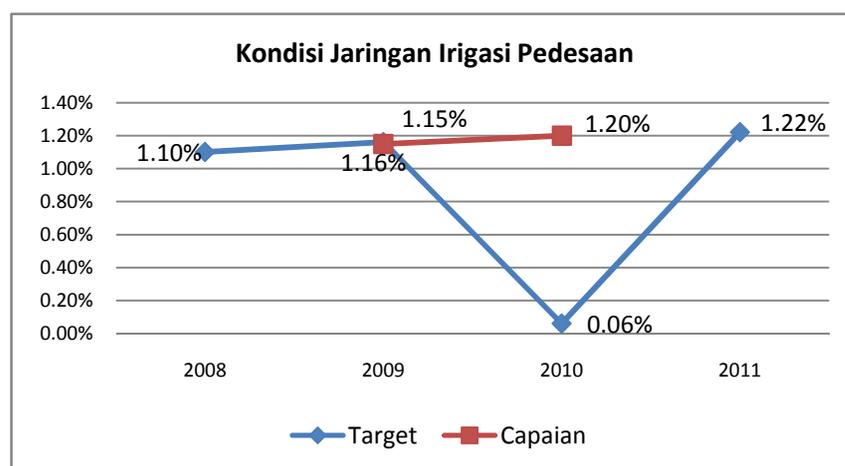


Jumlah fasilitas umum yang terbangun mengalami penurunan secara drastis, sesuai juga dengan nilai realisasi anggaran yang mengalami penurunan hingga Rp. 15,072,111,000,-. Ini disebabkan karena kebutuhan akan fasilitas umum belum terlalu dianggap penting sehingga target yang ditetapkan sebelumnya pun mengalami penurunan.

Grafik II.32: Peningkatan jaringan irigasi utama



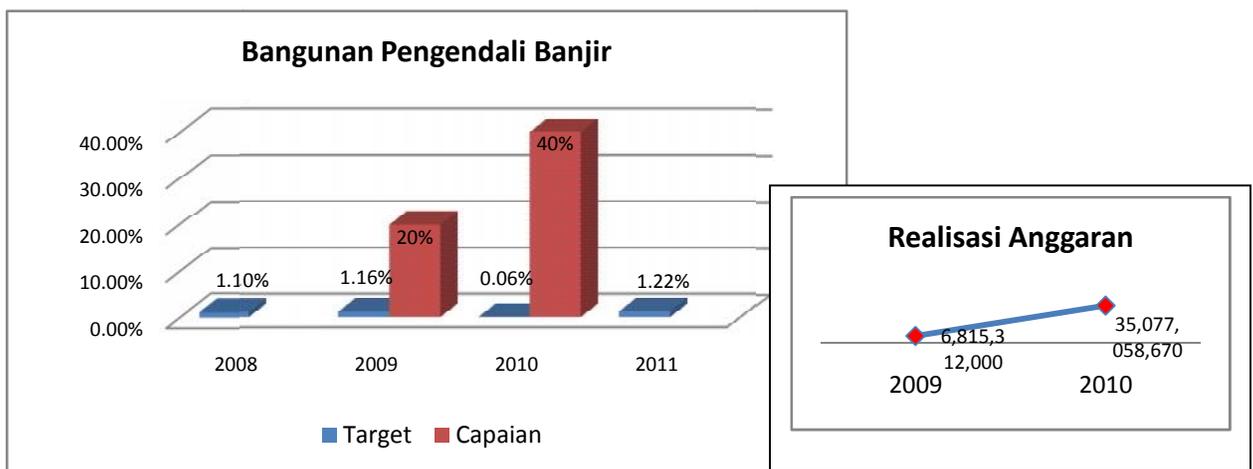
Grafik II.32: Kondisi jaringan irigasi pedesaan



Kondisi jaringan irigasi perdesaan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0.05% dari tahun sebelumnya, walaupun target yang telah ditetapkan mengalami penurunan sebesar 1.10% dengan selisih nilai anggaran sebesar Rp. 2,034,637,000,-.

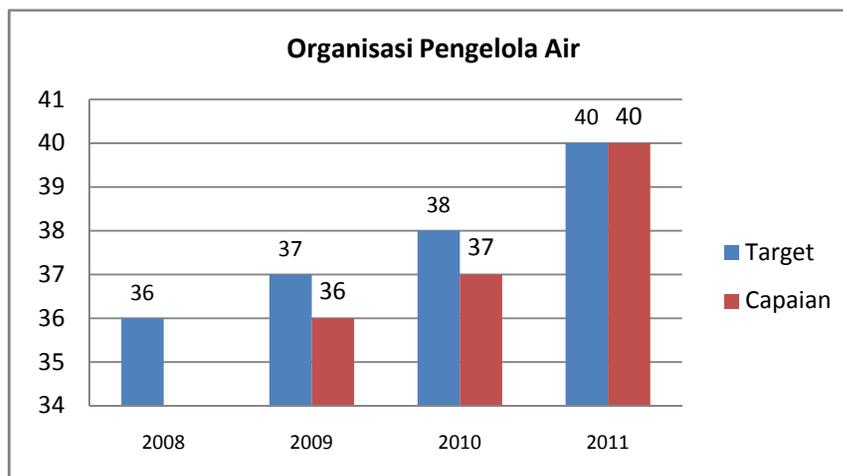


Grafik II.33: Bangunan pengendali banjir



Peningkatan capaian bangunan pengendali banjir memperlihatkan bahwa dapat teratasinya permasalahan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seiring dengan peningkatan realisasi anggaran yang tersedia, terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2010. Dengan capaian 20% pada tahun 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6,815,312,000,- lebih dianggap berhasil dibanding tahun 2010 dengan capaian 40% pada nilai anggaran Rp. 35,077,058,670,- , artinya untuk mencapai nilai 20% pada tahun 2010 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 28,261,746,670,-.

Grafik II.33 : Organisasi pengelola air



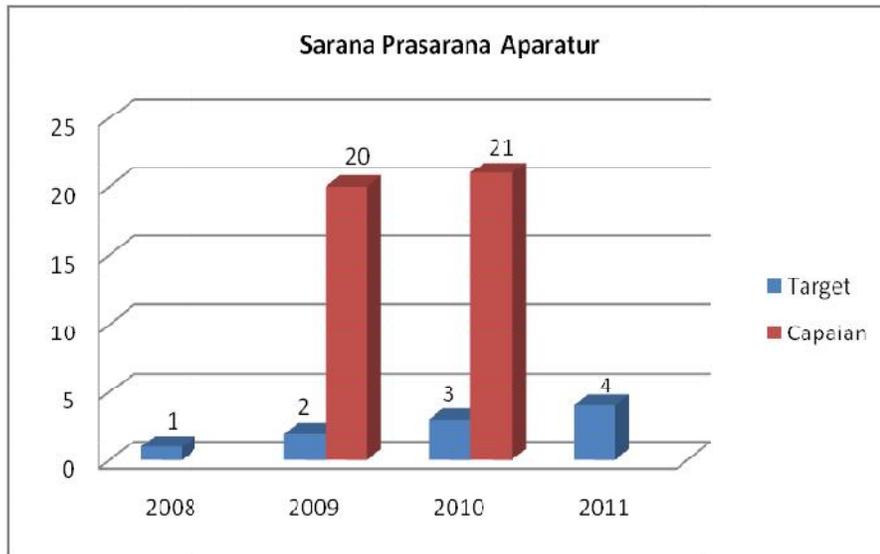
Berdasarkan grafik-33 memperlihatkan bahwa jumlah organisasi pengelola air mengalami penurunan pada 2 (dua) tahun sebelumnya sehingga belum bisa dikatakan mencapai target. Namun tahun 2011 dikatakan berhasil karena telah mencapai target.

Misi 6 :

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima

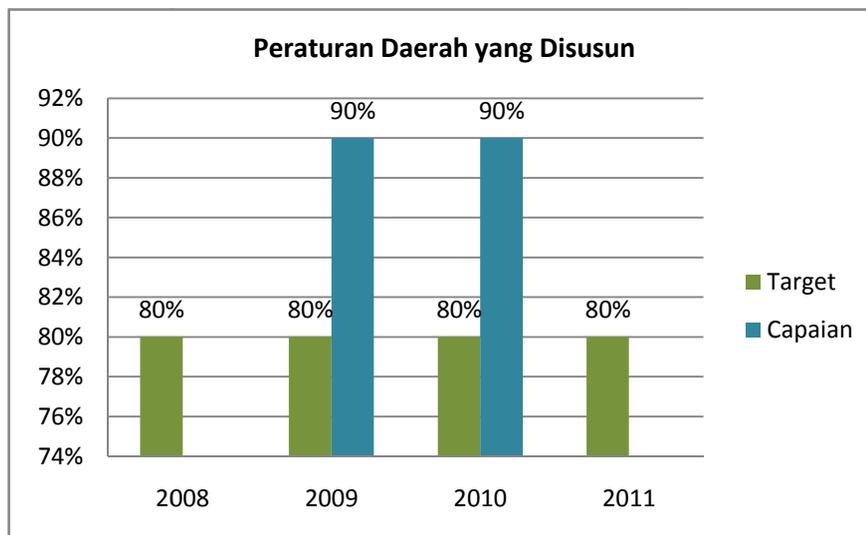
Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2010)	Capaian (2010)	Status
Misi 6 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima				
Program Prioritas : Program administrasi pemerintahan, pengelolaan informasi dan kearsipan				
1	Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur	1/17	3/25	21/25 •
Program Prioritas : Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Daerah				
1	Jumlah peraturan daerah yang disusun	89%	80%	90% •
2	Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknik)			
	Struktural	100%	100%	100% •
	Fungsional	100%	100%	100% •
	Teknik	86.60%	91%	91% •
3	Jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan	15	25	24 ↓
4	Jumlah SKPD yang menyusun standart pelayanan publik	15	25	2 ↓
5	Jumlah SKPD yang menyusun IKM	15	25	1 ↓

Grafik II.34: Sarana prasarana aparatur



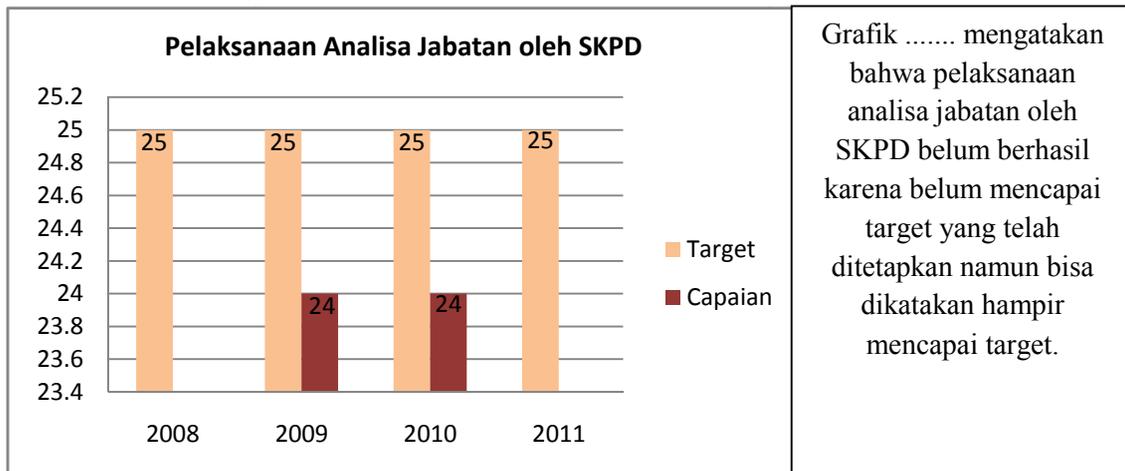
Grafik-34 menggambarkan capaian sarana prasarana aparatur terlihat peningkatan secara drastis pada tahun 2009 dan 2010, jika dikaitkan dengan nilai target yang telah ditetapkan sebelumnya hampir mengalami peningkatan sebanyak 20 sarana aparatur.

Grafik II.35: Peraturan daerah yang disusun

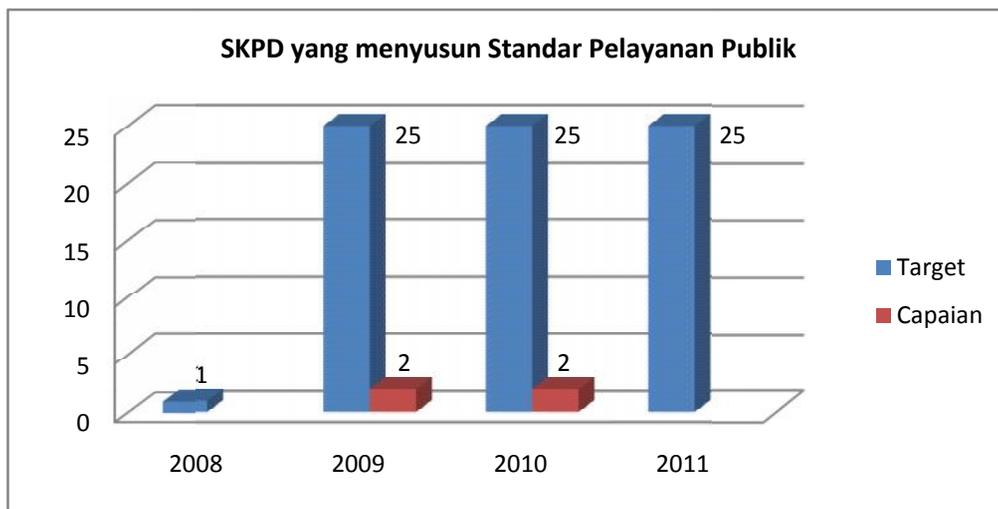


Grafik II.35 memberikan gambaran bahwa prosentase peraturan daerah yang disusun telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian capaian telah dikatakan berhasil.

Grafik II.37 : Pelaksanaan analisa jabatan oleh SKPD



Grafik II.38 : SKPD yang menyusun standar pelayanan publik



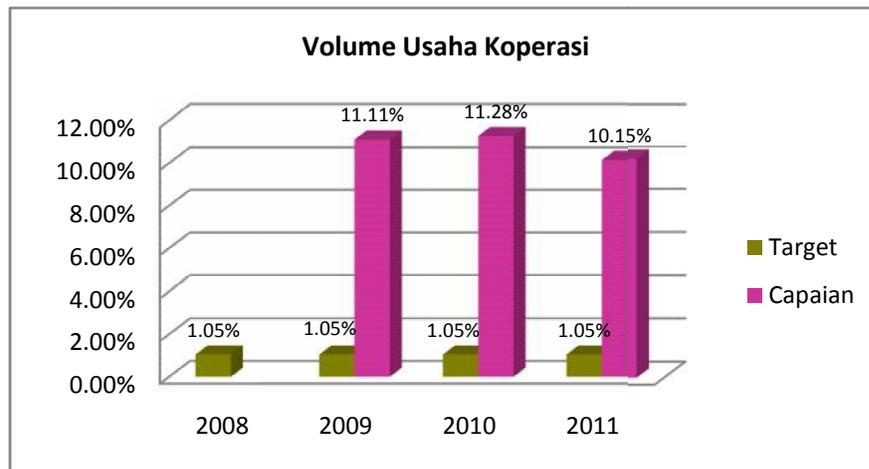
Berdasarkan grafik-35 terlihat bahwa jumlah SKPD yang menyusun standar pelayanan publik masih jauh dari target, hal ini akan berpengaruh terhadap SOP.

Misi 7 :

Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi

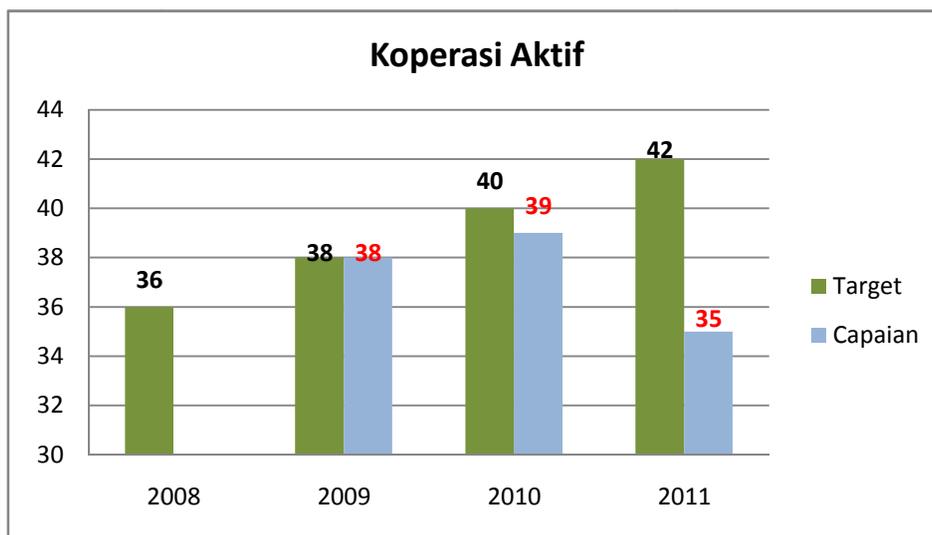
Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)	
Misi 7 : Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi				
Program Prioritas : Program Pengembangan Potensi lokal partisipatif				
1	Peningkatan volume usaha koperasi	379,416,000,000	40,486,000,000	36,430,000,000
2	Peningkatan koperasi aktif	34	42	35

Grafik II.39 : Volume usaha koperasi



Grafik II.39 menggambarkan bahwa prosentase volume usaha koperasi meningkat pesat jauh melebihi target. Ini berarti sejak tahun 2009 dapat dikatakan berhasil.

Grafik II.40 : Koperasi aktif



Grafik II.40 menerangkan bahwa jumlah koperasi aktif tercapai pada tahun 2009, dan mengalami peningkatan capaian sebanyak 1 unit pada tahun 2010 namun itu belum bisa dikatakan berhasil karena masih kurang dari target yang semestinya dicapai. Kondisi ini menurun drastis di tahun 2011, terlihat bahwa jumlah koperasi aktif menjadi 35 unit, artinya berkurang 4 unit dari capaian tahun sebelumnya dan masih kurang 7 unit untuk mencapai target tahun 2011 sehingga bisa dikatakan berhasil.

Misi 8 :

Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat

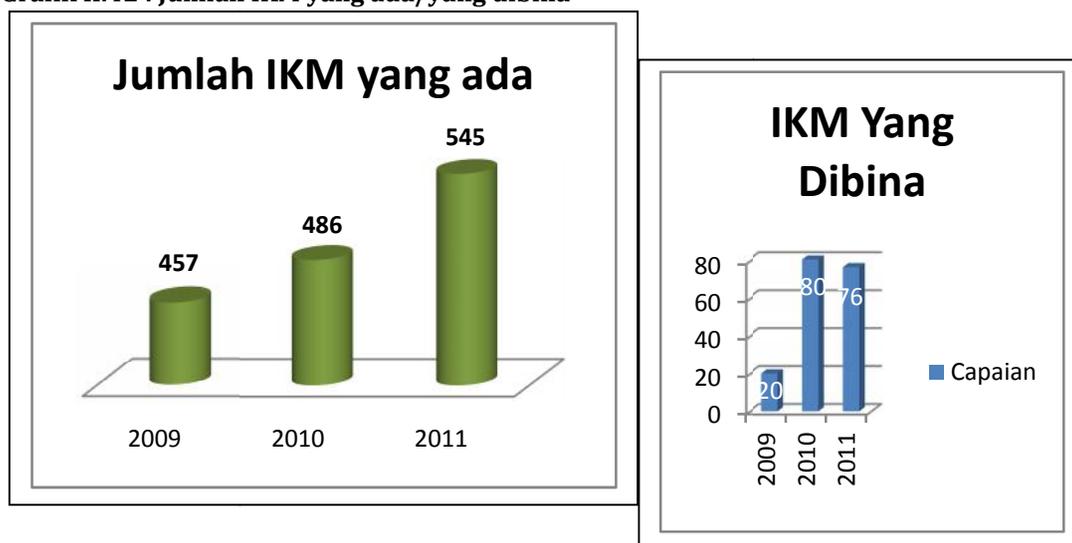
Indikator Kinerja		Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)
Misi 8 : Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat				
Program Prioritas : Program Pengembangan Koperasi dan UKM				
1	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah	821	900	545
Program Prioritas : Program Pengembangan Industri dan Perdagangan				
1	Peningkatan UKM yang dibina		80	76

Grafik II.41 berikut menggambarkan jumlah industri kecil dan menengah mengalami peningkatan secara drastis di tahun 2009 dan 2010 karena jauh melebihi target yang ditentukan. Namun capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 5.80% pada tahun 2011.

Grafik II.41 : Jumlah industri kecil dan menengah



Grafik II.42 : Jumlah IKM yang ada/yang dibina



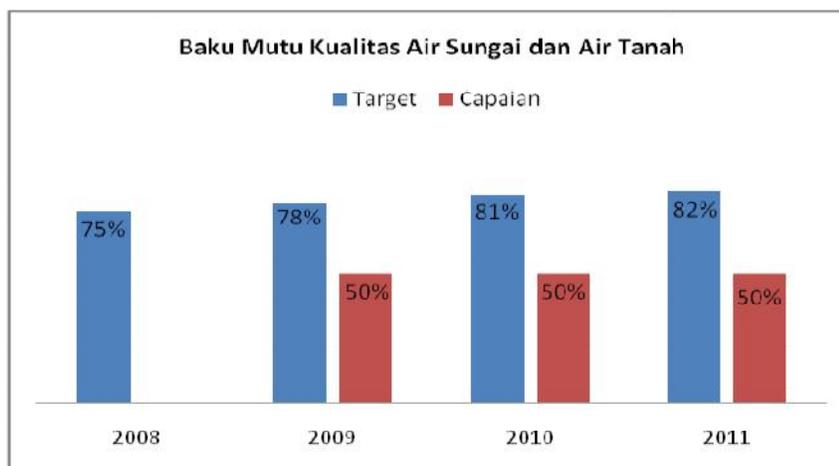
Grafik-39 menggambarkan bahwa jumlah IKM yang ada terus mengalami peningkatan, lain halnya dengan jumlah IKM yang dibina mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 60 unit namun mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 4 unit.

Misi 9 :

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

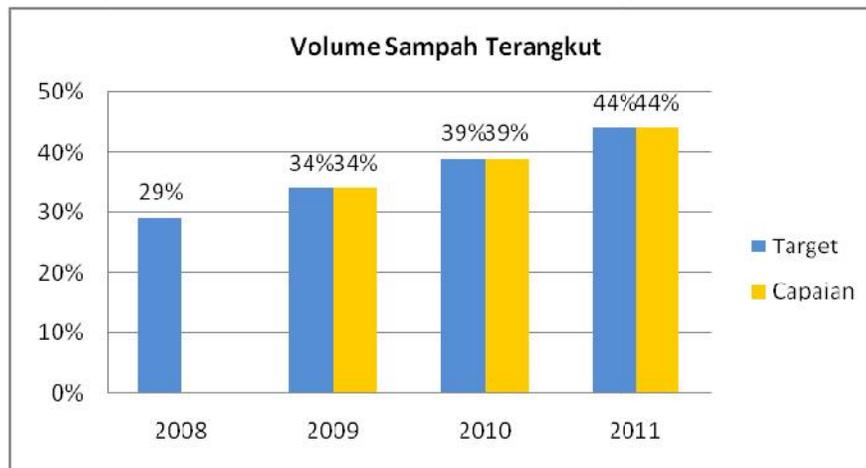
Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2011)	Capaian (2011)	
Misi 9 : Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan				
Program Prioritas : Program perlindungan dan konservasi SDA				
1	Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD, COD dan TSS) air sungai dan air tanah		82%	50%
Program Prioritas : Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				
1	Peningkatan volume sampah yang terangkut	24.98%	44%	44%
Program Prioritas : Program Perencanaan dan pengendalian pembangunan partisipatif				
1	Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang sesuai kebutuhan Daerah	15/2	15/12	19/15
Program Prioritas : Program Pelayanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan terjangkau				
1	Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata	2/7	1/7	7/7

Grafik II.43 : Baku mutu kualitas air sungai dan air tanah



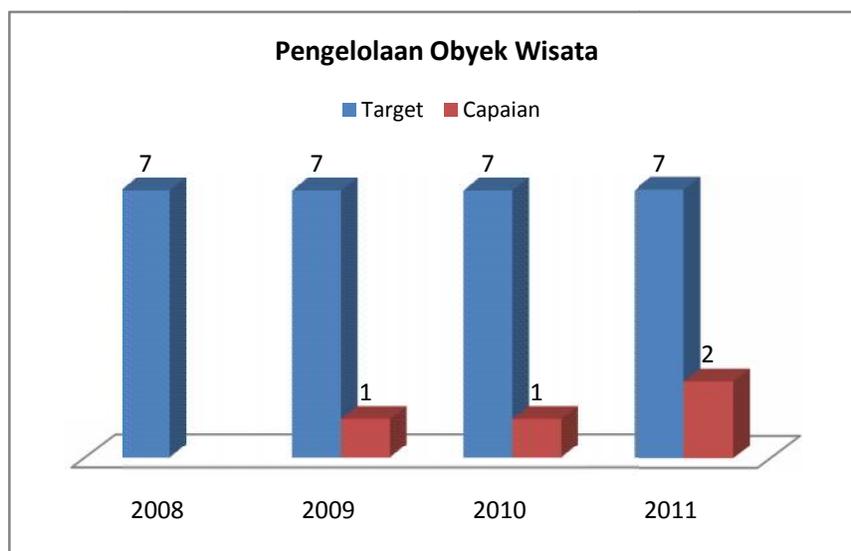
Grafik II.43 menggambarkan target awal perencanaan, kualitas air sungai dan air tanah belum mencapai target baku mutu. Terlihat tidak ada kenaikan capaian kualitas pada dua tahun pelaksanaan. Ini disebabkan karena jenis dan kandungan air sungan dan air tanah di wilayah Penajam Paser Utara yang berbeda dengan wilayah lain.

Grafik II.44 : Volume sampah terangkut



Grafik II.44 menggambarkan volume sampah yang terangkut sesuai dengan jumlah sampah, ini berarti sampah yang ada dapat terkelola dengan baik, para tenaga yang ditugaskan mampu bekerja dengan baik serta Organisasi Perangkat Daerah yang menangani masalah ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Semakin tahun volume sampah semakin meningkat, karena itu dibutuhkan suatu kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah.

Grafik II.45 Pengelolaan obyek wisata



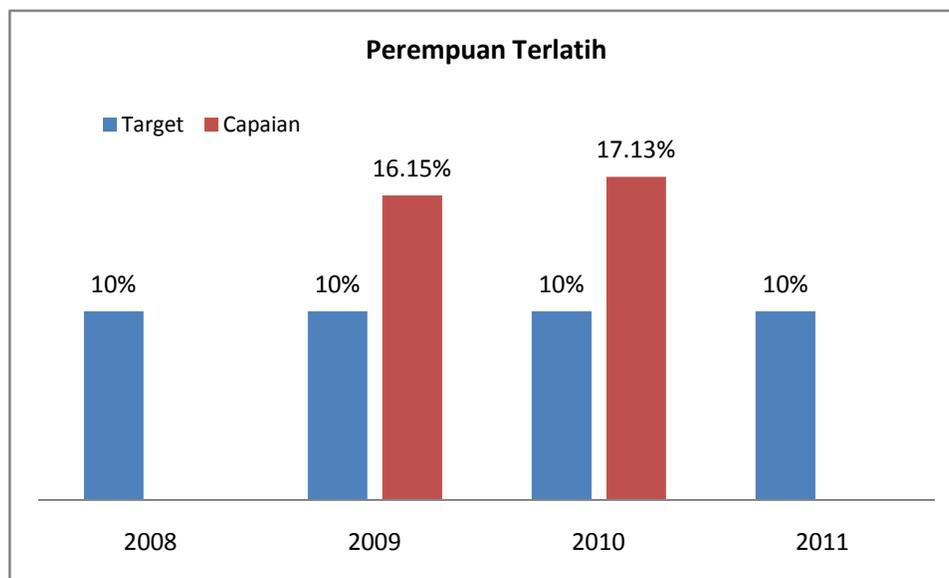
Grafik II.45 menggambarkan pengelolaan obyek wisata sangat diperlukan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari target yang telah ditentukan terlihat bahwa pengelolaan jumlah obyek wisata jauh lebih banyak, dengan demikian dapat menambah Pendapatan Anggaran Daerah.

Misi 10 :

Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis

Indikator Kinerja	Capaian Tahun Dasar (2007)	Target (2010)	Capaian (2010)
Misi 10 : Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis			
1	Program Prioritas : Peningkatan Jumlah Perempuan terlatih	10%	17.13%

Grafik II.46 : Perempuan terlatih



Grafik II.46 menggambarkan prosentase perempuan terlatih terlihat mengalami peningkatan sebesar 6.15% pada tahun 2006 dan 7.13% pada tahun 2010, dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan 0.98%.

Berdasarkan hasil evaluasi maka secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Belum semua program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Capaian yang dihasilkan kurang dari atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.
 - b. Capaian pada tahun sekarang (sp - n) lebih sedikit/berkurang dibanding tahun sebelumnya (n-1).
2. Besarnya nilai anggaran tidak semata-mata mempengaruhi tingkat atau besarnya capaian yang dihasilkan, karena itu perlu evaluasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya pelaksanaan program/kegiatan.
3. Saran tindakan, SKPD dalam menyusun rencana kerja untuk lebih fokus pada pencapaian target-target dalam RPJMD, mengingat periode RPJMD tersisa setahun lagi.

B A B I I I
R A N C A N G A N
K E B I J A K A N E K O N O M I D A E R A H

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada umumnya khususnya kabupaten Penajam Paser Utara ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian dan industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan di masa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang renewable dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2011 tumbuh sebesar 5,16 persen, dan pada tahun 2012 diasumsikan akan tumbuh sebesar 4,77 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja ekonomi nasional dan regional hingga pertengahan tahun 2011 ini menunjukkan arah yang semakin baik. Dari sisi ekonomi makro, stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Selain perekonomian global, kondisi sosial ekonomi dan harga-harga komoditas di pasar internasional juga mengalami peningkatan. Kombinasi eksternal inilah yang turut mendorong kinerja ekonomi nasional, termasuk Kalimantan Timur sebagai daerah yang mengandalkan ekspor primer juga mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2011 indikator makro ekonomi Kalimantan Timur, sebagaimana ditunjukkan oleh besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku

mencatat Rp. 390,64 triliun dan jika komponen migas dikeluarkan dalam penghitungan, maka PDRB (tanpa migas) sebesar Rp. 241,42 triliun, tanpa migas dan batubara maka nilai PDRB mencapai Rp. 121,28 triliun. Bila dilihat dari PDRB harga konstan besaran PDRB dengan migas tahun 2011 sebesar Rp. 115,24 triliun dan tanpa migas mencapai Rp. 74,92 triliun, dan PDRB tanpa migas dan batu bara maka bernilai Rp.43,96 triliun.

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

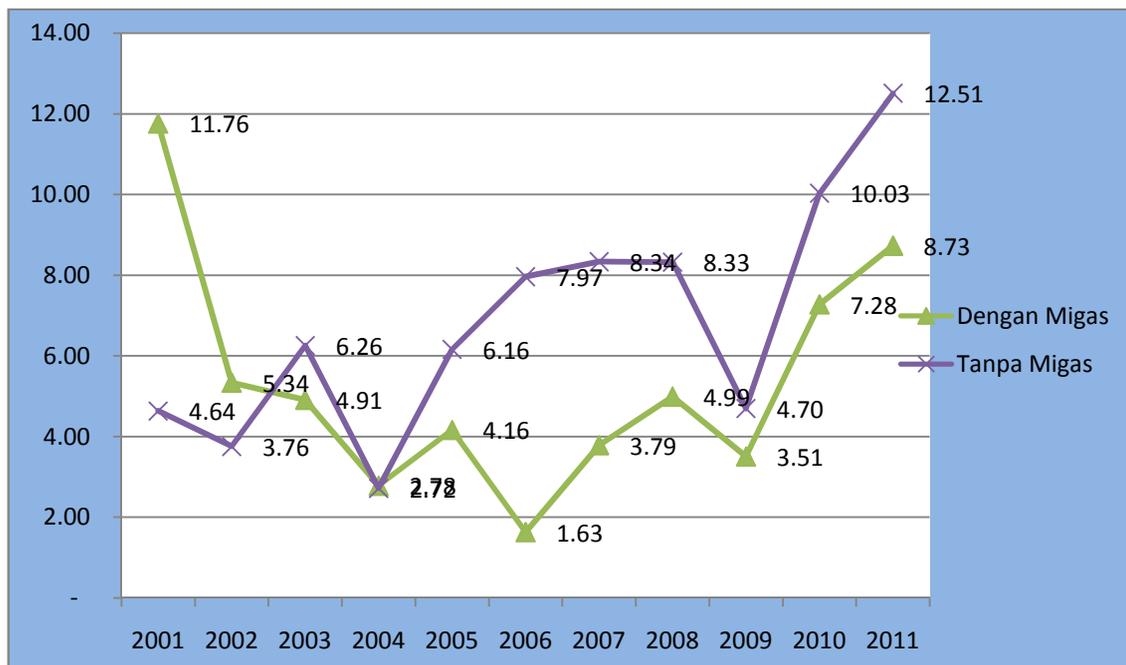
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini karena pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perokonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah.

Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga konstan dengan migas sebesar 3,2 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,923 triliun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2011 atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 8,73 persen dibandingkan tahun 2010. Jika dihitung tanpa migas PDRB tahun 2011 sebesar 2,235 triliun rupiah, sedangkan tahun 2010 sebesar 1,955 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 12,51 persen. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 dengan migas sebesar 2,111 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 1,984 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 6,004 persen. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 1,343 triliun rupiah, tahun 2010 sebesar 1,232 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 8,29 persen, artinya bahwa pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 baik dengan migas maupun tanpa migas merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu berdirinya kabupaten.

Grafik III.1 : Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2001 -2011



Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2011 bisa dilihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2 : Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2000 - 2011

Tahun	PDRB ADHK 2000		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	1.220.315,00	670.906,00		
2001	1.363.803,00	702.017,00	11,76%	4,64%
2002	1.436.614,00	728.412,00	5,34%	3,76%
2003	1.507.187,00	774.018,00	4,91%	6,26%
2004	1.549.149,00	795.097,00	2,78%	2,72%
2005	1.613.636,00	844.092,27	4,16%	6,16%
2006	1.639.973,00	911.327,49	1,63%	7,97%
2007	1.702.082,00	987.313,90	3,79%	8,34%
2008	1.787.049,00	1.069.529,41	4,99%	8,33%
2009	1.849.722,00	1.119.791,18	3,51%	4,70%
2010	1.984.290,00	1.232.134,00	7,28%	10,03%
2011	2.111.048,00	1.343.495,00	8,73%	12,51%

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara atas harga konstan pada tahun 2011 adalah sebesar 9,04 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertanian 8,07 persen, pertambangan dan penggalian 4,94 persen, industri pengolahan 3,12 persen, listrik, gas dan air bersih 0,96 persen, bangunan 14,44 persen, perdagangan hotel dan restoran -3,81 persen, pengangkutan dan komunikasi 10,60 persen, keuangan persewaan, jasa perusahaan 21,73

persen dan jasa-jasa 50,36 persen. Sedangkan jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 9,04 persen.

Tabel III.3 : Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha Tahun 2000 - 2011

No.	Lapangan Usaha	2010 ^{*)}	2011 ^{*)}	Laju Peningkatan
1	Pertanian	290.957,00	314.423,00	8,07%
2	Pertambangan & Penggalian	758.515,00	795.967,00	4,94%
3	Industri Pengolahan	419.052,00	432.138,00	3,12%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.156,00	4.196,00	0,96%
5	Bangunan	60.234,00	68.931,00	14,44%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	289.878,00	278.826,00	-3,81%
7	Pengangkutan & Komunikasi	24.585,00	27.192,00	10,60%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	57.570,00	70.078,00	21,73%
9	Jasa - Jasa	79.342,00	119.296,00	50,36%

Fenomena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas ini memperlihatkan perlunya menumbuhkan perekonomian masyarakat diluar sektor migas.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2013

Perekonomian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.

Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 :

Pertama, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan substitusi energi.

Kedua, semakin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya.

Ketiga, semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upaya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya penyebaran investasi.

Keempat, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima, regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

Pertama, kondisi jumlah penduduk saat ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi.

Kedua, Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor.

Ketiga, Penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran dan berakibat pada peningkatan angka kemiskinan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2013 sebagai berikut :

Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing

1. Meningkatkan produktifitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada system agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi , kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.
3. Pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan daerah, selain fokus tersebut juga diperlukan dukungan:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, listrik, irigasi guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi prasarana dasar perkotaan dan perdesaan
- c. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatnya daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi :

- a. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- b. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, pengelolaan pariwisata dan usaha mikro kecil menengah, dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- c. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan fasillitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga forum Economic Development Employment dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan aparatur.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang hibah dan bantuan sosial.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan di segala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD), serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1,141 trilyun diluar bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus. Adapun pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2013 diperkirakan sebesar 45 Milyar mengalami penurunan dibanding target tahun 2012 sebesar Rp. 46 milyar.

2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Dana perimbangan diproyeksikan Tahun 2013 tetap sebesar Rp. 1,019 trilyun

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp. 252 milyar, mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Secara lebih rinci target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 : Proyeksi target pendapatan tahun 2012 dan tahun 2013

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target	Target
		2012	2013
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.299.614.952.220	1.317.929.890.348,92
4.1	Pendapatan Asli Daerah	46.007.617.300	45.343.220.400,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.107.617.300	1.274.280.800,00
4.1.2	Retribusi Daerah	3.700.000.000	3.868.939.600,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	15.050.000.000	15.480.000.000,00
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli	25.150.000.000	25.150.000.000,00
4.2	Dana Perimbangan	1.019.170.569.000	1.019.170.569.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	846.000.000.000	846.000.000.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	169.033.829.000	169.033.829.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.136.740.000	4.136.740.000,00
4.3	Lain - lain Pendapatan Daerah	234.436.765.920	252.986.100.848,92
4.3.1	Pendapatan Hibah		
4.3.2	Dana Darurat		
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari	69.125.091.920	73.114.126.948,92
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	7.871.974.000	7.871.974.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	157.439.700.000	172.000.000.000,00

3.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi :

a. Pendapatan asli daerah (PAD) :

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;

- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan :

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

Lain-lain pendapatan daerah :

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2013 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi nasional yang ditunjang dengan membaiknya kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Namun perlu disadari bahwa dalam mencapai target pendapatan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala oleh seluruh aparat, yang didukung dengan kesadaran pelaku dunia usaha dan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Yang dibarengi dengan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.

- b. Sinkronisasi data pendapatan daerah
- c. Perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD).
- e. Memaksimalkan produk hukum yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- f. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
- g. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah sektor SDA maka perlu langkah-langkah berikut :
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran tetap dan iuran produksi kepada pemegang izin usaha pertambangan batubara sesuai kewenangan.
 - Melakukan rekonsiliasi secara berkala penerimaan iuran tetap dan iuran produksi dari pemegang ijin usaha pertambangan.

3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.

5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa / kelurahan yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total belanja daerah tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 1,141 Trilyun. Belanja Langsung dialokasikan lebih besar proporsinya daripada belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp. 381 Milyar meliputi :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 268 miliar dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah.
- b. Belanja hibah, Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp 52 Milyar yaitu pemberian hibah untuk kegiatan yang berkaitan pemilihan umum kepala daerah, serta penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue.
- c. Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp 7 miliar, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
- d. Bantuan Keuangan, direncanakan sebesar Rp 51 Milyar yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa.
- e. Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp 1,7 Milyar untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Tabel III.5 : Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 - 2013

URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013
BELANJA	1,510,447,045,435.00	1,385,428,489,995.72
BELANJA TIDAK LANGSUNG	334,211,112,410.00	381,251,756,309
Belanja Pegawai	244,481,822,152.00	268,930,004,367
Belanja Hibah	22,958,000,000.00	52,383,834,300
Belanja Bantuan Sosial	14,268,300,000.00	7,000,000,000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	51,187,917,642.00	51,187,917,642
Belanja Tidak Terduga	1,315,072,616.00	1,750,000,000
BELANJA LANGSUNG	1,176,235,933,025.00	1,004,176,733,686.72
Belanja Pegawai	78,252,617,280.00	78,252,617,280
Belanja Barang dan Jasa	238,748,251,552.00	214,873,426,396.80
Belanja Modal	859,235,064,193.00	711,050,690,009.92
SURPLUS / (DEFISIT)	(210,832,093,215.00)	(67,498,599,647)
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	243,440,949,164.91	97,998,599,647.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	168,112,473,499.00	97,998,599,647.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	75,328,475,665.91	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32,608,855,949.91	30,500,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	31,608,855,949.91	20,500,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	210,832,093,215.00	67,498,599,647.00

3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

B A B I V

P R I O R I T A S D A N S A S A R A N
P E M B A N G U N A N D A E R A H T A H U N 2 0 1 3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
2. Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;
3. Identifikasi isu strategis daerah dan nasional;
4. Masalah mendesak ditingkat daerah (peningkatan mutu pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan sarana infrastruktur);
5. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Berdasarkan analisis terhadap hal-hal di atas maka pelaksanaan pembangunan tahun kelima RPJMD melalui RKPD tahun 2013 ditetapkan dengan Tema :

“MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF MENUJU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MANDIRI MELALUI GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MANDIRI (GERBANG MADANI)”

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sesuai Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013, yaitu mengoptimalkan fungsi perencanaan partisipatif dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia yang baik secara komprehensif dalam mendukung penguatan pertanian secara luas sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 – 2013 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”

Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia;
2. Infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan;
3. Kondisi infrastruktur fisik yang belum memadai;

4. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta memperhatikan isu strategis , Kabupaten Penajam Paser Utara maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai;
3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima;
7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi;
8. Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat;
9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan;
10. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya yang agamis.

Dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara ditempuh melalui 3(tiga) tujuan strategis pembangunan daerah yang dikemas dalam gerakan pembangunan masyarakat desa mandiri (GERBANG MADANI), yaitu:

1. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri;
2. Membangun ekonomi rakyat yang produktif;
3. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius.

Adapun Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah:

1. Sasaran dari tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Mandiri adalah :
 - a. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun;
 - b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - e. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas;
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - g. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk;
 - h. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan.
2. Sasaran dari tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang Produktif adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian;
 - c. Peningkatan kemandirian desa;
 - d. Meningkatnya infrastruktur desa;
 - e. Pembangunan Infrastruktur daerah;
 - f. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan;
 - g. Mewujudkan pengelolaan struktur daya air dan listrik yang lebih baik;
 - h. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil.
3. Sasaran dari tujuan mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang aman, damai dan religius, adalah :
- a. Meningkatkan iklim lingkungan yang kondusif;
 - b. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana;
 - c. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama antar umat beragama;
 - d. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas.

4.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam rangka pencapaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, Pemerintah Daerah beserta instansi vertikal lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan agenda utama pembangunan jangka menengah 2008-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera;

- b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, professional dan inovatif;
- c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara;
- d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, ditetapkan sasaran dari program-program yang menjadi prioritas pembangunan sebagai berikut :

PRIORITAS		SASARAN PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada pendidikan kejuruan yang professional.	a.	Dituntaskannya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa.
		b.	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
		c.	Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah.
2	Peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat.	a.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
		b.	Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas.
		c.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
		d.	Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk.
3	Mewujudkan revitalisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan daerah.	a.	Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
		b.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian.
4	Mewujudkan kemandirian desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.	a.	Peningkatan kemandirian desa.
		b.	Meningkatnya infrastruktur desa.
5	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian.	a.	Pembangunan Infrastruktur daerah.
		b.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan.
		c.	Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan listrik yang lebih baik.

6	Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan inovatif.	a.	Diterapkannya prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada semua tingkatan pemerintahan.
7.	Menciptakan rasa dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi	a.	Meningkatnya iklim lingkungan yang kondusif
8.	Peningkatkan pranata kelembagaan ekonomi rakyat	a.	Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah
		b.	Mendorong usaha besar dan kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
		c.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung Penguatan ekonomi kerakyatan
9.	Pengembangan potensi wilayah dan tata ruang	a.	Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana
10.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya	a.	Meningkatkan rasa aman bagi semua warga negara
		b.	Meningkatkan aktifitas keagamaan dan harmonisasi kehidupan beragama

B A B V

R E N C A N A P R O G R A M
D A N K E G I A T A N P R I O R I T A S D A E R A H

Memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten, isu strategis dan prioritas pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, perikanan, perkebunan, agroindustri dan penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 33 urusan yang terdiri atas :

I. URUSAN WAJIB			
1.	Pendidikan	14.	Tenaga Kerja
2.	Kesehatan	15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.	Pekerjaan Umum	16.	Penanaman Modal Daerah
4.	Perumahan	17.	Kebudayaan
5.	Penataan Ruang	18.	Pemuda dan Olahraga
6.	Perencanaan Pembangunan	19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.	Perhubungan	20.	Pemerintahan Umum
8.	Lingkungan Hidup	21.	Kepegawaian
9.	Pertanahan	22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	23.	Statistik
11.	Pemberdayaan Perempuan	24.	Kearsipan
12.	KB dan Keluarga Sejahtera	25.	Komunikasi dan Informatika
13.	Sosial		
II. URUSAN PILIHAN			
1.	Pertanian	5.	Kelautan dan Perikanan
2.	Kehutanan	6.	Perdagangan
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	7.	Perindustrian
4.	Pariwisata	8.	Transmigrasi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, ditetapkan juga program-program yang menjadi prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 sebagai berikut :

Misi 1		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Profesional	
Program Prioritas Pembangunan		Kegiatan	
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	1.	Pembangunan Gedung Sekolah
		2.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
		3.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		4.	Pengadaan Meubelair Sekolah
		5.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		6.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah TK/RA/PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta
		7.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kelas IV dan VI (Prog.Lanjutan)
		8.	Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Kelas I dan III (Prog.Lanjutan)
		9.	Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD/MI
		10.	Pelatihan Pengembangan Kurikulum SMP/MTs
		11.	Operasional Ujian Nasional SMP/MTs 2012
		12.	Pelatihan Bedah Skl SMP/MTs
		13.	Try Out SD
		14.	Try Out SMP/ MTs
		15.	Training Center Olimpiade MIPA Kabupaten SD/MI Tahun 2012
		16.	Penyelenggaraan RSBI SMPN 5 PPU
		17.	Persiapan ISO Pada 2 SMP
		18.	Por SD Tahun 2012 Tuan Rumah (Anggaran APBD II) OOSN SMP Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
		19.	Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
		20.	Porseni Guru Tk Kab, Prov & Nasional
		21.	Lomba UKS Tingkat PAUD (Tk/Kab), SD, SMP Kab, Prov & Nasional
		22.	Lomba UKS SMA Tingkat Kab, Prov & Nasional
		23.	Pekan Olahraga Pnfi Tingkat Propinsi
		24.	Training Centre OSN Kabupaten SMP Tahun 2012
		25.	OSN Propinsi SMP Tahun 2012
		26.	Olimpiade MIPA Propinsi SD Th. 2012
		27.	Lomba Pidato Bahasa Inggris SD & SMP
		28.	Penyelenggaraan SSN /SMPN 1 & SMPN 4 PPU
		29.	Liga Pendidikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
		30.	OOSN SMA Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
		31.	FLS2N SMP Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
		32.	FLS2N SD Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional OOSN Usia Dini (SD) Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

		<ol style="list-style-type: none"> 33. Monitoring/Evaluasi Kinerja Kepala SD/SMP 34. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas SD/SMP 35. Workshop Pengawas Sekolah 36. Tim Pembina UKS 37. Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD/MI, SMP/MTs Tk. Kab. Th.2012 38. Olimpiade MIPA Jalur B Tk. Propinsi Jenjang SD Th. 2012 39. Olimpiade MIPA Jalur B Tk. Propinsi Jenjang SD Th. 2012 40. Pelatihan Kepala Sekolah SMP/MTs 41. Pelatihan Kepala Sekolah SD/MI 42. Penghargaan Kepsek, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi SD/SMP 43. Operasional Ujian Nasional SD/MI 44. Pelatihan Seni Budaya Bagi Guru SMP 45. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan MSDP Oleh Pengawas 46. Peningkatan Keolahragaan (POR SD/MI) 47. Pengadaan 70 UNit Scanner Ljk 48. Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD/SMP/SMA/SMK 49. Pengadaan Meubelair Siswa Sekolah SSN dan RSBI 50. Pengadaan Interactive Whiteboards For Education SD/SMP/SMA/SMK 51. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SD/SMP/SMA/SMK 52. Pengadaan Buku Ensiklopedia Jenjang SD/SMP/SMA/SMK 53. Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD/SMP 54. Pembangunan Rumah Dinas Guru 55. Pembangunan Pagar SDn 028 Penajam 56. Pengadaan Printer Multifungsi UNtuk SD dan SMP 57. Pengadaan Software Pembelajaran untuk SD dan SMP 58. Pembangunan dan Pemasangan Paving Blok 59. Pembangunan Pagar Sekolah 60. Pembangunan dan Pemasangan Paving Blok Sekolah 61. Pembangunan Sistem Informasi dan Infrastruktur 62. Pendukung Jardiknas 63. Pengadaan Buku Pelajaran 64. Pengadaan Drumband Marching Band 65. Pengadaan Alat Ipa Berbasis Sains /Mipa Berbasis Sains
2.	Program Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Sekolah 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga sekolah 3. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4. Penyelenggraan Paket C Tc Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK 5. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK (BOSDA) 6. Operasional UN/US SMA/MA dan SMK 7. Pelatihan Paskibra Tk. Kabupaten 8. Olimpiade SMA Tingkat Kabupaten PPU 9. Olimpiade Sains SMA Tingkat Propinsi 10. Lomba UUD Tahun 1945 11. FLS2N SMA Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional 12. Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten, Propinsi dan

		<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Magang Guru 14. Penghargaan Kepsek, Guru, Pengawas dan Siswa Berprestasi SMA / SMK ISO 9001; 2008 15. Subsidi TDS SMA/MA dan SMK 16. Ujian Nasional & Ujian Sekolah SMA/MA/SMK 17. Lomba UUD Tingkat Propinsi 18. Diklat OSN SMA Bagi Guru 19. Tc Olimpiade SMA Tk. Provinsi 20. Lomba Sains Terapan SMK Tk. Kab. 21. Tc Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK 22. Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK Tk. Propinsi 23. LKS Siswa SMK Tk. Kabupaten 24. LKS SMK Tk. Provinsi 25. Try Out SMA/MA & SMK 26. Pengadaan Meubelair Sekolah 27. Monitoring/Evaluasi Kinerja Kepala SMA/MA/SMK 28. Diklat KTSP SMA/MA dan SMK 29. Diklat Pengembangan Diri Guru / Kepsek /Pengawas Gol. IV a 30. Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Kab 31. Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Propinsi 32. Diklat Guru Bk SMA/MA dan SMK 33. Diklat Analisis SKL SMA/MA dan SMK (Pembuatan Soal Model UN) 34. Magang Guru OJT 35. EDS (Evaluasi Diri Sekolah) SMA/MA dan SMK 36. Lomba Sains Guru SMA 37. Lomba Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi SMA/MA dan SMK 38. Diklat Penilaian Pak Fungsional Guru 39. Diklat Non Ujian Nasional 40. Surveyland ISO 41. Pembangunan Graha Pemuda PPU 42. Pengadaan Alat Peraga Keterampilan Berpikir Berbasis Sains 43. Pengadaan Pusat Sumber Belajar Integrated It Infrastruktur 44. BOSDA 45. Pengadaan Alat Peraga Kesenian/Musik SMP, SMA dan SMK 46. Pengadaan Alat Peraga Kesenian Modern dan Tradisional 47. Pengadaan Alat Peraga Matematika SMA 48. Pengadaan Peralatan Bengkel Otomotif SMK 49. Pembangunan Mushalla
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutor PAUD 2. FLS2N TK/PAUD Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
4.	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 2. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KF) (Prog.Lanjutan) 3. Jambore PTK PAUD Ni Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sertifikat Guru) Verifikasi Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 3. Penyedia Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan 4. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (Provinsi) Operasional Petugas Angka Kredit (PAK) 5. Tunjangan Penambahan Penghasilan Guru
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Pelatihan Tenaga Operator Pendataan 2. Pelatihan Pengelolaan Data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3. Pembuatan Profil Pendidikan 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Jardiknas 5. Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan dana BOSDA
7.	Program Pemuda Dan Olahraga	1. Bhakti Pemuda Antar Propinsi 2. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
8.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	1. Pembangunan Gedung Olah Raga (Multiyears 2009-2013)

Misi 2

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai

Program Prioritas Pembangunan		Kegiatan	
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Pengawasan & Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan 5. Pengambilan Obat Buffer Stock 6. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas)	
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 2. Rapat Teknis Petugas Pengelola Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 7. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 8. Peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten PPU	

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Pengendalian Vektor dan Penyehatan Lingkungan Pasca Bencana / KLB 10. Revitalisasi Sistem Kesehatan 11. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas) 12. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan 13. Pelatihan Petugas Kesehatan Mata Puskesmas
3.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
4.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2. Survey PHBS & Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3. Peningkatan Pengetahuan Petugas Desa Siaga 4. Pelatihan UKS se Kab PPU 5. Pengukuran Dan Sosialisasi Saka Bhakti Husada
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang 3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
7.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 3. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic 4. Peningkatan Imunisasi 5. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) Tenaga Surveillance 7. Pemeriksaan Kesehatan Haji 8. Sosialisasi DBD 9. Pemberantasan Penyakit HIV / AIDS 10. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Kusta 11. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit TBC 12. Sosialisasi Pembentukan Klinik VCT HIV / AIDS 13. Pengukuhan KPA dan Seminar HIV / AIDS 14. Peningkatan KIE Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Malaria
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan Penyusunan Standar Minimal Kesehatan (SPM) untuk SOP Puskesmas, UPT & Puskesmas 24 Jam 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Study komperatif absorpsi Teknologi Pengembangan Sistem informasi kesehatan (SIK) 4. Penyusunan Profil Kesehatan Kab. PPU 5. Pengkajian Pengembangan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 6. Peningkatan Mutu Pengembangan Service Excellent Dalam Pelayanan Kesehatan

9.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.	Pelayanan operasi katarak
10.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Persiapan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas pembantu
11.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Kemitraan Pengolahan limbah Rumah dan Puskesmas Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Pemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Jamkesmas Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (Jamkesmas) Peningkatan Kapasitas SDM Pada Program Jamkes/Jamkesmas PPU Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat PPU (UPTD Jamkesda) Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (UPTD Jamkesda)
12.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Kader Posyandu Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS) Pelatihan Manajemen Data dalam Pemantapan Analisa PWS KIA Imunisasi Balita Penyuluhan Kesehatan Balita
13.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
14.	Program pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan	1.	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
15.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. 2. 3.	Pelatihan Asuhan Persalinan normal Pelatihan Manajemen Asfeksia pada Bayi Baru Lahir Pelatihan Manajemen Data Dalam Pemantapan Analisa PWS-KIA
16.	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1. 2. 3.	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
17.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. 2. 3.	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Penyelenggaraan Hari-hari Besar dan Hari-hari Khusus

		4. 5.	Penyuluhan Diabetes Melitus "DM" Peningkatan Etika Mutu Keperawatan
18.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Profil) Penyusunan dan Pengembangan Standar Pelayanan Medis Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
19.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Pengembangan Ruang Operasi Pengembangan Ruang Gawat Darurat Pengembangan ICU, ICCU & NICU Pengembangan Ruang Bersalin Pengembangan Ruang Rontgen Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Pembangunan Instalasi Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Ambulans Mobil Jenazah Pengadaan Meubeleur Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Percetakan dan Administrasi Rumah Sakit Pengembangan Type Rumah Sakit
20.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	1.	Pembangunan RSUD Tipe C (Sisa Full Design) (Multiyears 2009-2013)
21.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	1. 2. 3.	Penyuluhan Kesehatan Bagi BUMIL Perawatan Berkala Bagi BUMIL Pertolongan Persalinan Bagi BUMIL
22.	Program Keluarga Berencana	1. 2. 3. 4. 5.	Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembinaan Keluarga Berencana Peringatan Harganas
23.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
24.	Program Pelayanan Kontrasepsi	1.	Pengadaan Alat Kontrasepsi
25.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	1. 2. 3.	Pendataan Keluarga Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

26.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	1. 2.	Penilaian Kelompok Kegiatan (POKTAN) Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.
27.	Program Peningkatan Penanggulangan NARKOBA, PMS Termasuk HIV AIDS.	1.	Penyuluhan Penanggulangan NARKOBA, PMS Termasuk HIV AIDS.

Misi 3

Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program peningkatan kesejahteraan petani	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pekan Daerah/Pekan Nasional Kelompok Tani Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Penilaian petani berprestasi Penilaian kelompok tani berprestasi Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur
2.	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan/ peternakan dan perikanan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Kegiatan Penanganan Pasca Panen & Pengolahan Hasil Pengembangan Pertanian Pada Lahan kering Pengembangan Ketahanan Pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana pembenihan/pembibitan Hari jadi Pertanian dan Pameran Peningkatan mutu dan keamanan pangan Penyusunan data base potensi produksi pangan Pengembangan desa mandiri pangan Penyuluhan sumber bahan pangan alternatif Penelitian dan Pengembangan teknologi pasca panen Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan
3.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan/peternakan dan perikanan	1. 2.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Lomba keanekaragaman produk hasil olahan pertanian
4.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	1. 2.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

	/peternakan dan perikanan		
5.	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 	<p>Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan</p> <p>Pengadaan Pestisida</p> <p>Penyusunan Statistik pertanian dan perkebunan</p> <p>Pendampingan tanaman pangan padi & Palawija</p> <p>Pendampingan PLA pertanian</p> <p>Pengadaan pupuk tanaman</p> <p>SID optimalisasi lahan</p> <p>Pengembangan Holtikultura</p> <p>Pengadaan Pupuk Hayati</p> <p>Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Rakyat</p> <p>Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Perkebunan</p>
6.	Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian/ perkebunan/ peternakan/perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	<p>Penilaian penyuluh berprestasi</p> <p>Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan</p> <p>Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan</p> <p>Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan</p> <p>Forum koordinasi BPP propinsi kaltim</p> <p>Pemberdayaan THL pusat sebagai penyuluh pertanian/penyelia mitra tani kabupaten (THL-TBPP dan THL-PMT)</p> <p>Data base kelembagaan/penyuluhan pertanian PPL Pertanian</p>
7.	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	<p>Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)</p> <p>Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan</p> <p>Pengembangan Hutan Tanaman</p> <p>Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan</p> <p>Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan</p>
8.	Program pengembangan budidaya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<p>Pengembangan bibit ikan unggul</p> <p>Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan</p> <p>Monitoring kesehatan ikan dan penanggulangan penyakit ternak</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Perikanan</p>
9.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Pengembangan balai benih ikan</p> <p>Pengembangan kawasan budidaya air tawar</p> <p>Pengembangan kawasan budidaya air payau</p>
10.	Program pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir</p>

	ekonomi masyarakat pesisir		
11.	Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	1.	Kegiatan Penyuluhan Perijinan Perikanan dan Kelautan
12.	Program pengembangan perikanan tangkap	1.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Pengadaan sarana dan prasarana nelayan
13.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	1.	Penyusunan dan pengumpulan data statistik perikanan
14.	Program peningkatan produksi hasil ternak	1.	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
		2.	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
		3.	Pengembangan agribisnis perternakan
		4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		5.	Peningkatan Mutu Genetik Ternak & reproduksi ternak
		6.	Pendataan dan redis ternak pemerintah
		7.	Pendataan populasi ternak
		8.	Pembelian & Pendistribusian Bibit Ternak
		9.	Pengembangan dan Peningkatan kualitas pakan ternak
15.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
		2.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
		3.	Pengadaan sarana dan prasarana pos kesehatan hewan
		4.	Pengadaan obat Hewan dan Peralatan kesehatan hewan
16.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
17.	Program peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	1.	Penyuluhan budaya kelautan
18.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
		2.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
		3.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
		4.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
		5.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
		6.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
19.	Program peningkatan pemasaran hasil	1.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

	produksi ternak	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi kerja sama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer 3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan 5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 6. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan 7. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 8. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 9. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat 10. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 11. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 12. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan di pasarkan 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
--	-----------------	---

Misi 5

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung produktifitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program pembangunan jalan dan jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jalan Wilayah Girimukti Dalam (Multiyears 2009-2013) 2. Pembangunan Jalan Kawasan - Poros - Pusat Pemerintahan (Multiyears 2009-2013) 3. Pengalihan Trase Jalan Propinsi (Multiyears 2009-2013) 4. Peningkatan Jalan simpang bere-bere - Tj. Tengah - Petung - Kedung rejo - Seloloang - Pejala - Kp. Baru - Girimukti - Pondok Uma (Multiyears 2009-2013) 5. Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang – Majapahit (Multiyears 2009-2013) 6. Peningkatan Jalan Nenang - Gn. Steleng - Gn. Ulin (Multiyears 2009-2013) 7. Pembangunan Jalan Inggur - Majapahit - Gn. Steleng RT.06 (Multiyears 2009-2013) 8. Peningkatan Jalan Gn. Intan - Gn. Makmur - Sebakung jaya (Multiyears 2009-2013). 9. Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder Gang ali - Rawa Mulia - Babulu Laut (Multiyears 2009-2013). 10. Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu laut – Labangka (Multiyears 2009-2013). 11. Peningkatan Jalan Sesulu - Bendung Waru - Bangun Mulia (Multiyears 2009-2013). 12. Peningkatan Jalan IKK Waru (Multiyears 2009-2013). 	

		<ol style="list-style-type: none"> 13. Pembangunan Coastal Road (Multiyears 2009-2013). 14. Pembangunan Jembatan Coastal Road(Multiyears 2009-2013). 15. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka (Multiyears 2011-2013). 16. Peningkatan Jalan Wilayah Sebakung Jaya - Sumber Sari (Multiyears 2011-2013). 17. Pembangunan Jalan 18. Lanjutan Pembangunan Jalan 19. Lanjutan Pelebaran jalan Nasional 20. Pembangunan Jembatan 21. Peningkatan Jalan
2.	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
3.	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Terminal 2. Pembangunan Pelabuhan 3. Pembangunan Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah
4.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL
5.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan 3. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 4. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 5. Pengumpulan dan Analisis Data base pelayanan Jasa angkutan 6. Pemilihan dan Pemberian penghargaan Supir/juru Mudi/Awak kendaraan angkutan umum teladan
6.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Rambu Lalu Lintas 2. Pengamanan Natal dan Tahun Baru 3. Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu 4. Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah
7.	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Pemasangan instansi pengolah air (WTP) Kec. Sepaku
8.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan WTP dan Air Bersih (Multiyears 2009-2013). 2. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears 2009-2013).
9.	Program Pembangunan Sistem informasi/data base jalan dan jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan
10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan

		3.	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dari TPS dan TPA
11.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Pembangunan Drainase Jalan Pembangunan Saluran Pembuang Pembangunan Saluran Irigasi Pembuatan Drainase Gang Pembangunan Pintu Air
12.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	1.	Pembangunan Embung Lawe-lawe (Multiyears 2009-2013).

Misi 6			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			
Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Pembangunan Gedung Arsip (Multiyears 2012-2013). Pembangunan Kantor Camat Waru (Multiyears 2012-2013). Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perijinan dan Investasi Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan standar satuan harga Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

		10.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
		11.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya
		2.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah	1.	Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah
		2.	Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
		3.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
		4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
		5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
		6.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
		7.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
		8.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		9.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		10.	Penyusunan system informasi keuangan daerah
		11.	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah
		12.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
		13.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
		14.	Peningkatan manajemen asset/barang daerah
		15.	Peningkatan manajemen investasi daerah
		16.	Revaluasi/appraisal asset/ barang daerah
		17.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
		18.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Program Penataan Adminstrasi Kependudukan	1.	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
		2.	Kegiatan Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
		3.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
		4.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		5.	Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kegiatan Pelayanan Akta Catatan Sipil dalam Kantor 7. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor 8. Kegiatan Prasarana Administrasi Akta Pencatatan Sipil 9. Kegiatan Sosialisasi Mobilisasi Pendudukan dalam rangka Penerapan, Penerbitan E-KTP dan 10. Kegiatan Penerapan dan Penerbitan E-KTP secara massal di Kabupaten Penajam Paser Utara 11. Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Data Daftar penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) 12. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
8.	Program Pembinaan Dan Pendidikan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Bantuan Parpol
9.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
11.	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah 2. Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 3. Pengumpulan Data dan Informasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
12.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
13.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 3. Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4. Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 5. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 6. Proses Pensiun PNS dan Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS 7. Pelantikan Pejabat 8. Penyusun dan Penilaian Jabatan / Kepangkatan PNS 9. Proses Penetapan NIP CPNS 10. Proses Kenaikan Pangkat CPNS 11. Penyusunan Formasi CPNS 12. Proses Mutasi PNS 13. Proses Karsu/Karis, Taspen, Askes dan Karpang 14. Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya 15. Monitoring Pelaksanaan Aparatur 16. Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian 17. Sumpah janji PNS 100 %

		18. 19. 20. 21.	Sidang-sidang BAPERJAKAT Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS Konvensi NIP
14.	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	1. 2. 3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Desa
15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kormonev Program Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kabupaten PPU Pendataan LP2P Evaluasi Lakip Satuan Kerja Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu Pendampingan dan Pengawasan Eksternal Review Laporan Keuangan
16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan	1.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
17.	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	1. 2.	Rakornas Tingkat Propinsi , Regional dan Nasional Rapat Pemuktahiran data Tingkat Propinsi dan Regional
18.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	1.	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
19.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Bidang Hukum Dalam Pengembangan Pembinaan Hukum Pembahasan Perda dan LKPJ Rapat - Rapat Paripurna Istimewa Rapat Dengar Pendapat Sosialisasi Raperda

Misi 7			
Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuhkembangkan kepercayaan dalam berinvestasi			
Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program pemanfaatan ruang	1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)& Zoning Regulation Kecamatan Sepaku
		2.	Monitoring, Pengendalian Dan Evaluasi IMB
		3.	Sosialisasi IMB Dan Pengurusan IMB
		4.	Pelaksanaan Pengurusan Ijin Jasa Kontruksi
2.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
		2.	Pengembangan potensi unggulan daerah
		3.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
		4.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
		5.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
		6.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
		7.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
		8.	Penyelenggaraan pameran investasi
		9.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.	Forum Komunikasi Intelejen Daerah
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.	Verifikasi Bantuan Parpol

Misi 8			
Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat			
Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
		2.	Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha
		3.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
		4.	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
		5.	Pengembangan pasar lelang daerah
		6.	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan
		7.	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.	Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
		2.	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industry
		3.	Penyusunan kebijakan industry terkait dan industry penunjang industry kecil dan menengah
		4.	Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil dan menengah
		5.	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industry kecil dan menengah
		6.	Fasilitasi kerjasama kemitraan industry mikro, kecil, menengah dan swasta
3.	Program penataan struktur industri	1.	Kebijakan keterkaitan industry hulu-hilir
		2.	Penyediaan sarana maupun prsarana kluster industry
		3.	Pembinaan keterkaitan produksi industry hulu hingga hilir
4.	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	1.	Koordinasi modal venture bagi industry berbasis teknologi
		2.	Pelayanan pengembangan modal venture dan inkubator
		3.	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
		4.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi pengujian dan kualitas
		5.	Pengembangan system inovasi teknologi industry
		6.	Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi
5.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	1.	Pembinaan kemampuan ternologi industri
		2.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
		3.	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industry manufaktur
		4.	Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur
6.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industry potensial
		2.	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat

7.	Program pembinaan pedagang kaki lima	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penyuluh peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagangn kaki lima dan asongan Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
8.	Program perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan	1. 2. 3. 4.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
9.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Fasilitasi pengembangan incubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industry dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.	Program peningkatan kualitas kelembangaan dan usaha koperasi	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi Pembangunan sistem informasi Perencanaa Pengembangan perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasandan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
		2.	Pengembangan klaster bisnis
		3.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
		4.	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
		5.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
		6.	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
		7.	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
		8.	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
		9.	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
		10.	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
		11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Misi 9

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.	Pemeliharaan Taman Kota
		2.	Penanaman Pohon Peneduh
		3.	Pembangunan RTH Perumahan Sei Parit
		4.	Pembangunan Taman Median Jalan
		5.	Pembangunan Taman Makam
		6.	Perencanaan Median Jalan Propinsi
		7.	Pembangunan Pagar BRC Median Jalan
		8.	Pengadaan Bibit Pemeliharaan Taman Kota
		9.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pengelolaan RTH
		10.	Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur, dan manual pengelolaan RTH
		11.	Penyusunan dan analisa data/informasi pengelolaan RTH
		12.	Penyusunan program pengembangan RTH
		13.	Penataan RTH
		14.	Pemeliharaan RTH
		15.	Pengembangan taman rekreasi
		16.	Pengawasan dan pengendalian RTH
		17.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
		18.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.	Program pengendalian banjir	1.	Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai
3.	Program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
		2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
		3.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 5. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Perusahaan dalam Pengendalian LH 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (Tim AMDAL) 8. Ekspose Adipura 9. Kajian Analisis Kualitas Air Pada Badan Air yang dilalui oleh kegiatan Industri atau Perkebunan
4.	Program perlindungan dan konservasi SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Konservasi daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber Air 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 3. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 4. Sekolah Berwawasan Lingkungan / Adiwiyata 5. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
5.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C 2. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Rapat koordinasi bidang pertambangan se Provinsi Kalimantan Timur 5. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Bidang Penambangan 6. Koordinasi kegiatan reklamasi dan rencana Penutupan Tambang
6.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Pelaksanaan Reboisasi Pada Kawasan Hutan (DAK-DR Tahap I dan II)
7.	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8.	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan
9.	Program perencanaan dan pengembangan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan hutan masyarakat adat 2. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
10.	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2. Pengembangan hutan tanaman 3. Pengembangan hasil hutan non kayu 4. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 5. Optimalisasi PNBK 6. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 7. Pengembangan industry dan pemasaran hasil hutan

		8.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
		9.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
11.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	1.	Pembangunan Pasar Induk Penajam (Multiyears 2011-2013).

Misi 10

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA YANG AGAMIS

Program prioritas pembangunan		Kegiatan	
1.	Program pengembangan nilai budaya	1.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
		2.	Penatagunaan naskah kuno nusantara
		3.	Penyusunan kebijakan tentang budaya local
		4.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
		5.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
2.	Program pengelolaan keragaman budaya	1.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
		2.	Penyusunan system informasi data base bidang kebudayaan
		3.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
		4.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
		5.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
		6.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktulisasi budaya local
		7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
3.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1.	Pendataan PMKS dan PSKS
4.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		2.	Pengelolaan Barang Bantuan Sosial
5.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	1.	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat
6.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.	Pembinaan, Penampungan, dan Pemulangan bagi Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya

7.	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. 2.	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
8.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
9.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelaksanaan Penunjang Lembaga LKS Tripartit Penyelesaian Kasus PHI/PHK, Mogok Kerja / Unjuk rasa Penunjang Dewan Pengupahan Kab. PPU Pelaksanaan Penunjang Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan Kab. PPU
10.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
11.	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. 2.	Penunjang Kegiatan & Operasional TIM SAR Sosialisasi Kesiagaan Penanggulangan Bencana
12.	Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran
13.	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. 2. 3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD Pendampingan Pelayanan Teknologi Tepat Guna
15.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin
16.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Lomba Kades dan Lurah Berprestasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Perlombaan Desa dan Kelurahan Gelar Teknologi Tepat Guna Pembinaan Posyantekdes dan TTG Unggulan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Koordinasi Program Pengelola Kegiatan PNPM-MP (PAP) Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penerapan Sistem Aplikasi Profil Desa/Kelurahan
17.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	1. 2. 3. 4.	Pembangunan Masjid Agung (Multiyears 2009-2013) Pembangunan Kompleks Islamic Center (Manasik dan Jalan Masuk) (Multiyears 2009-2013) Pembangunan Sekolah Terpadu (Sisa Full Design) (Multiyears 2009-2013) Pembangunan Pasar Induk Penajam (Multiyears 2011-2013).

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2013 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2013. Adapun KUA-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2013;
5. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2013;
6. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode tahun 2014.

6.2 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam RAPBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP S.Sos